

**EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM BERAS UNTUK
RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
DI KECAMATAN SERANG KOTA SERANG
TAHUN 2009**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh.
ERIK AGUSTIARA
NIM. 062399

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG – BANTEN
2010**

**EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM BERAS UNTUK
RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
DI KECAMATAN SERANG KOTA SERANG
TAHUN 2009**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:
Erik Agustiara
NIM. 062399

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG – BANTEN
2010**

ABSTRAK

Erik Agustiara. NIM. 062399. Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I, Gandung Ismanto S.Sos M.M, Pembimbing II, Yeni Widyastuti S.Sos M.Si.

Kata kunci : Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik, Program Raskin

Pemerataan kebutuhan pokok merupakan salah satu fokus pemerintah di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pokok merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi oleh masyarakat termasuk beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Program raskin adalah program nasional yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin yang termasuk ke dalam kategori rumah tangga miskin (RTM) sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan beras dengan harga murah dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Namun, di dalam proses pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah yang dapat menghambat program tersebut dalam mencapai tujuannya. Salah satunya adalah tidak terserapnya sebagian masyarakat miskin untuk menjadi penerima raskin serta tidak diterapkannya kriteria program raskin dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmanakah Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, dimana yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi penerima raskin di Kecamatan Serang sebanyak 4.904 RTM. Perhitungan sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan 10 persen, maka jumlah sampel yang didapat adalah 98. Instrumen dalam penelitian ini berupa kisi-kisi pertanyaan (kuesioner) yang didasarkan pada indikator evaluasi kebijakan publik menurut teori Dunn. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *proportionate stratified random sampling*. Tehnik analisa data menggunakan uji hipotesis t-test satu sampel. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($2,32 \geq 1,296$), maka pelaksanaan program raskin di Kecamatan Serang mencapai angka 67,13% lebih besar dari angka yang dihipotesiskan yaitu 62,5 %. Saran peneliti adalah perlu adanya pendataan ulang kepada masyarakat miskin terkait dengan penetapan penerima raskin dan perlu diterapkannya kriteria penerima raskin dengan baik kepada masyarakat miskin.

ABSTRACT

Erik Agustiarra. NIM. 062399. Evaluation of Rice For Poor Households (Raskin) Program Implementation In District of Serang, Serang City in 2009. Public Administration, Faculty of Social and Political. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor I, Gandung Ismanto, S.Sos. M.M, Advisors II, Yeni Widyastuti, S.Sos M.Si.

Keywords: Evaluation of Public Policy Program Implementation, Rice For Poor Households (Raskin) Program,

Justification of primary needs is one of government focus, in case for improving social prosperity, especially for the poor people. It's caused of that the primary needs are the must have goods for people. Rice, as the primary food of Indonesia's is one of the primary needs. Raskin program is a national program made by the government given to poor people which is become a part of poor households category. This program, itself is a kind of government policy to improve social prosperity by giving a low price rice. For the poor people. The matter is, there are some problems on this process. That might be a trouble in case to reach it's purpose. One of them is fast, that not all of the poor people receive this kind rice. Another problems is the unwell program criteria implementation. Problem focus in this research is, how far is implementation of the rice for poor people program in the District of Serang, Serang City. And this research supposed to knowing the implementation of rice for poor people program in District of Serang, Serang City. The research using the descriptive quantitative method. Population in this research are people that became the object of this program in Serang District, at about 4.904 households. The sample calculate by using Slovin Formulation with 10 % error rate. Therefore, 98 households found. Instrument in this research is question grids based on Dunn theory of public policy evaluation indicators. Sampling techniques in this research is proportionate stratified random sampling. The data analysis techniques is one sample t-test hypothesis. The result shows that the Implementation of rice poor households program the calculation result, found that t_{count} is bigger than t_{table} ($2,32 \geq 1,296$), it means that this program implementation reached 67,13 % from lower number, 62.5 %. Researcher advice that a recollect data is a must, in case to knowing the subject of this program. The criteria at the object of this program is a needs too.

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : ERIK AGUSTIARA
NIM : 062399
Judul : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KECAMATAN SERANG KOTA SERANG TAHUN 2009

Serang, Oktober 2010
Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Gandung Ismanto, S.Sos M.M
NIP : 197408072005011001

Yeni Widyastuti, S.Sos M.Si
NIP : 197602102005012003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dr. A. Sihabudin, M.Si
NIP: 196507042005011002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erik Agustiara

NIM : 062399

Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 19 Juli 1989

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KECAMATAN SERANG KOTA SERANG TAHUN 2009 adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Oktober 2010

Erik Agustiara
NIM. 062399

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ERIK AGUSTIARA
NIM : 062399
JUDUL SKRIPSI : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BERAS
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI
KECAMATAN SERANG KOTA SERANG TAHUN 2009

Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal
bulan..... tahun..... dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**

Serang, Oktober, 2010

Ketua Penguji

(Gandung Ismanto S.Sos M.M)

NIP.197408072005011001

Anggota

(Anis Fuad S.Sos)

NIP.198009082006041002

Anggota

(Dr.Asnawi Syarbini)

NIP.195207261981031002

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA

Ketua Program Studi

(Dr. A. Sihabudin, M.Si)

NIP.196507042005011002

(Kandung Sapto N. S.Sos M.Si)

NIP.197809182005011002

Alhamdulillah Robbil' alamin. . .

"LEBIH BAIK DIASINGKAN DARIPADA MENYERAH PADA
KEMUNAFIKAN"

(GIE)

Persembahkan:

*Ku berikan hasil karya Akhir Kuliah ini Melalui
hasil perjuangan selama empat tahun lamanya
dengan penuh semangat Kepada Ayah, Ibu dan
kedua Adik ku tercinta*

*"Perubahan yang Hakiki adalah ketika dimana kita menyadari
bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah
cermin dari apa yang telah kita lakukan pada hari ini"*

(Erik Agustiar)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Tiada kata yang layak terucap selain mengucap syukur kepada sang pencipta Allah Swt yang tiada henti memberikan segores tinta semangat dan harapan, hingga akhirnya catatan akhir kuliah yang sederhana ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda, Ibunda, dan Adik-adikku yang selalu kubanggakan. Catatan akhir kuliah ini aku persembahkan untuk kalian yang sangat berarti dalam hidup ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan pengajaran, bantuan, serta dukungan moriil dan materiil dalam upaya penyelesaian penelitian ini yang berjudul **"Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009"**. Untuk itu, penulis sampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Dr. Agus Sjafari, M.Si. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Rahmi Winangsih, S.Sos., M.Si. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Idi Dimiyati, S.Ikom selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Kandung Sapto N, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Rina Yulianti, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Gandung Ismanto, S.Sos M.M selaku Dosen pembimbing akademik dan Dosen Pembimbing I Skripsi, yang telah memberikan banyak arahan selama perkuliahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi.
9. Yeni Widyastuti, S.Sos M.Si selaku Dosen Pembimbing II Skripsi, yang telah memberikan arahan dan motivasinya dalam proses penyusunan skripsi.
10. Anis Fuad, S.Sos. selaku Dosen penguji proposal skripsi, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing MPA, yang telah banyak memberikan arahan selama proses pengujian proposal skripsi dan penyusunan MPA.
11. Ayuning Budiati, S.IP. MPPM yang telah banyak memberikan nasehat, arahan serta dukungan moriil selama proses perkuliahan.
12. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang telah

membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa selama perkuliahan.

13. Camat Kecamatan Serang dan seluruh Pegawai di Kecamatan Serang yang telah banyak membantu dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti selama proses penelitian berlangsung.
14. Kepala Kelurahan di seluruh Kecamatan Serang beserta seluruh Stafnya yang telah banyak membantu dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti selama proses penelitian berlangsung.
15. Masyarakat Kecamatan Serang yang menjadi Penerima Raskin yang telah banyak memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam proses penelitian.
16. Keluarga besar kakek dan nenekku yang begitu besar mendukung dan memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Rini Try Wahyuni, penyemangat yang selalu setia menemani dan membantu penulis selama ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
18. Ma'ruf Amin selaku ketua kelas F selama perkuliahan dan sekaligus sebagai sahabat yang selalu setia menemani dari semester awal kuliah hingga saat ini.
19. Para sahabat lainnya, Sutandi, Firmanuddin, Jahidi yang selama ini banyak memberikan dukungan dan motivasi selama proses perkuliahan.
20. TB Roby Nurman, yang selalu setia menemani dan memberikan motivasi selama ini.

21. Anak-anak Bonaparte, Uwes, Azwar, Leo, Ade, Okta, teh Yeni, teh Lilis, serta teman-teman kelas angkatan 2006 lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya selama empat tahun lamanya menuntut ilmu di perkuliahan.
22. Keluarga Besar Untirta Movement Community (UMC) yang selama ini banyak memberikan pengetahuan melalui kajian diskusi dan bergerak dengan hati nurani menuju perubahan yang diharapkan bersama. ”Dari Diskusi Bergerak Menuju Perubahan...”
23. Kawan-kawan pengurus HMJ Ilmu Administrasi Negara 2008-2009. terima kasih atas kerjasamanya selama ini yang sangat berkesan dan tak pernah terlupakan.
24. Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP 2009-2010. terima kasih atas kerjasama dan dukungannya selama ini yang sangat berkesan.
25. Kawan-kawan mahasiswa baik Ilmu Administrasi Negara maupun Ilmu Komunikasi FISIP yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi ormawa yang saya pimpin.
26. Teman-teman KKM 71 Kelurahan Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu yang telah memberikan banyak kenangan indah selama melakukan pengabdian kepada masyarakat setempat.

Selain itu, penulis sebagai penyusun menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang dimiliki, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Disisi lain, penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Serang, Oktober 2010

Penulis

Erik Agustiara

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR DIAGRAM..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Batasan masalah 15

C. Rumusan masalah 16

D. Tujuan penelitian 17

E. Manfaat penelitian..... 17

F. Sistematika penulisan 18

BAB II TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Deskripsi teori	21
1. Konsep Kebijakan Publik	22
2. Konsep Evaluasi Kebijakan	25
3. Konsep Pelaksanaan Kebijakan Publik	30
4. Konsep Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik	31
5. Konsep Pembangunan Ekonomi	33
6. Deskripsi Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	35
7. Konsep Program Raskin	38
B. Kerangka Berpikir	40
C. Hipotesis Penelitian	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	46
B. Instrumen Penelitian	47
1. Jenis dan Sumber Data	49
2. Teknik Pengumpulan Data	50
C. Populasi dan Sampel Penelitian	52
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	56
1. Uji Validitas	57
2. Uji Reliabilitas	58
3. Uji T-test satu sampel	59

E. Lokasi dan Jadwal Penelitian	60
---------------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	62
1. Gambaran Umum Penduduk Kecamatan Serang.....	64
2. Gambaran Umum Program Raskin Kecamatan Serang.....	67
B. Pengujian Persyaratan Statistik.....	70
1. Hasil Uji Validitas.....	70
2. Hasil Uji Reliabilitas	73
C. Deskripsi Data Penelitian	74
1. Identitas Responden	74
2. Analisis Data Penelitian.....	80
D. Pengujian Hipotesis.....	118
E. Interpretasi Hasil Penelitian.....	121
F. Pembahasan	123

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	135

DAFTAR PUSTAKA	139
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Kriteria Evaluasi Kebijakan	28
TABEL 3.1	Skoring Item Instrumen.....	48
TABEL 3.2	Instrumen Penelitian	48
TABEL 3.3	Teknik Perhitungan Sampel	55
TABEL 3.4	Waktu Penelitian	61
TABEL 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Serang Tahun 2008	65
TABEL 4.2	Jumlah Kepadatan Penduduk dan Mata Pencaharian Sebagian Besar Penduduk Kecamatan Serang Tahun 2008	66
TABEL 4.3	Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera Kecamatan Serang Tahun 2008	67
TABEL 4.4	Daftar Alokasi Pagu Raskin Provinsi Banten Tahun 2009	68
TABEL 4.5	Daftar Alokasi Pagu Raskin Kota Serang Tahun 2009.....	69
TABEL 4.6	Daftar Alokasi Pagu Raskin Kecamatan Serang Tahun 2009.....	70
TABEL 4.7	Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrumen.....	72
TABEL 4.8	Statistik Reabilitas.....	74
TABEL 4.9	Indikator Skor Hasil Penelitian	122

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Kerangka Berpikir	41
GAMBAR 4.1 Peta Kecamatan Serang	63
GAMBAR 4.2 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis	121

DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	75
DIAGRAM 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia	76
DIAGRAM 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	77
DIAGRAM 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Perhari.....	78
DIAGRAM 4.5 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	79
DIAGRAM 4.6 Kepuasan Penerima Raskin Terhadap Kualitas Beras Raskin	81
DIAGRAM 4.7 Kepuasan Penerima Raskin Terhadap Perolehan Beras Raskin	83
DIAGRAM 4.8 Program Raskin Meringankan Beban Hidup Penerima Raskin.....	85
DIAGRAM 4.9 Program Raskin Mengurangi Beban Pengeluaran Keluarga Miskin	87
DIAGRAM 4.10 Kemampuan Penerima Raskin Terhadap Harga Beras Raskin.....	89
DIAGRAM 4.11 Kesesuaian Harga Beras Raskin Terhadap Kualitas Berasnya	91
DIAGRAM 4.12 Ketepatan Waktu Proses Penyaluran Beras Raskin	93
DIAGRAM 4.13 Proses Penyaluran Beras Raskin Tanpa Adanya Pungutan Lain	94
DIAGRAM 4.14 Penerima Raskin Sangat Mengandalkan Beras Raskin	96
DIAGRAM 4.15 Program Raskin Dapat Memenuhi Kebutuhan Pokok	98
DIAGRAM 4.16 Kecukupan Penerima Raskin Terhadap Jumlah Berasnya.....	100
DIAGRAM 4.17 Kesesuaian Jumlah Beras Raskin Terhadap Kebutuhan Beras Penerima Raskin.....	102
DIAGRAM 4.18 Adanya Perataan Dalam Pembagian Jatah Beras Raskin.....	104
DIAGRAM 4.19 Adanya Perataan Dalam Penyampaian Informasi Program Raskin.....	106
DIAGRAM 4.20 Pengetahuan Penerima Raskin Terhadap Pengurangan Jumlah Penerima.....	107
DIAGRAM 4.21 Pengetahuan Penerima Raskin Terhadap Kriterianya.....	109
DIAGRAM 4.22 Sasaran Program Raskin Adalah Masyarakat Miskin Yang Sesuai Dengan Kriteria Program.....	111
DIAGRAM 4.23 Kesesuaian Kriteria Dengan Harapan Penerima Raskin.....	113
DIAGRAM 4.24 Penerima Raskin Membeli Beras Raskin Seharga Rp 1.600 per Kg.....	114
DIAGRAM 4.25 Kepuasan Penerima Raskin Terhadap Pelaksanaan Program	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ditimbulkan oleh adanya ketimpangan pembangunan ekonomi suatu negara, diantara pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan. Sehingga hal tersebut menjadi persoalan besar bagi banyak negara di dunia untuk terus meningkatkan pembangunan ekonominya, agar tidak semakin terpuruk dalam perkembangan zaman yang kian mengalami perubahan. Pada mulanya banyak negara berkembang mengidentikkan bagaimana upaya meningkatkan pembangunan ekonomi, adalah dengan cara meningkatkan pendapatan perkapita rakyatnya. Usaha tersebut dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi negaranya.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara semata-mata tidak dapat diukur dari sisi tingkat pertumbuhan ekonominya saja, karena pembangunan ekonomi memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar pertumbuhan ekonomi, yang lebih berorientasi pada peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional. Indikator keberhasilan negara dalam hal pembangunan perekonomiannya juga perlu diukur dari bagaimana negara menangani permasalahan-permasalahan sosial secara komprehensif. Dalam upaya negara meningkatkan pembangunan ekonomi, sekaligus mengatasi

permasalahan sosial tersebut, maka diperlukan suatu strategi yang dapat membantu negara untuk mengupayakan terwujudnya pembangunan perekonomian yang disertai dengan penyelesaian permasalahan sosial secara tepat.

Strategi pembangunan ekonomi merupakan strategi yang dipandang tepat dalam menyikapi kondisi tersebut, karena lebih menekankan tidak hanya pada bagaimana negara dalam upaya meningkatkan pendapatan perkapita yang diarahkan pada pertumbuhan ekonominya saja, melainkan juga menekankan pada bagaimana upaya negara dalam mengatasi persoalan pembangunan. Strategi pembangunan ekonomi meliputi : *pertama*, strategi pertumbuhan dengan distribusi; *kedua*, strategi kebutuhan pokok (*basic needs*); *ketiga*, strategi pembangunan mandiri (*self-reliant development*); *keempat*, strategi pembangunan berkelanjutan (*ecodevelopment*); dan *kelima*, strategi berdimensi etnik (*ethnodevelopment*).¹

Strategi yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi suatu negara adalah strategi kebutuhan pokok, karena strategi tersebut dipandang sebagai dasar utama dalam strategi pembangunan ekonomi dan sosial. Pemenuhan kebutuhan pokok lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan minimum konsumsi (sandang, pangan, papan) dan jasa umum (kesehatan, transportasi umum, air, dan fasilitas pendidikan).² Kebutuhan dasar manusia tidak terlepas dari adanya pemenuhan kebutuhan pokok yang lebih menekankan pada keberlangsungan hidup dan proses

¹ Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. hal 11-13

² Ibid.

regenerasi kehidupan manusia di dunia. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, negara dituntut untuk berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara kompleks. Karena kebutuhan pokok masyarakat merupakan kebutuhan utama yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat menuju kesejahteraan masyarakatnya.

Upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dilakukan oleh banyak negara, termasuk negara Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang (*developing countries*). Hal ini tidak terlepas dari peranan pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara fundamental, yang diorientasikan untuk menciptakan iklim pemerataan kebutuhan dasar manusia secara tepat dan berkelanjutan. Salah satu upaya pemerintah tersebut tercermin dalam memenuhi kebutuhan minimum konsumsi pangan berupa beras, yang notabene merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia.

Sasaran upaya peningkatan pemerataan kebutuhan pokok berupa beras diprioritaskan kepada semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan sosial, termasuk didalamnya adalah masyarakat miskin. Hal tersebut disebabkan, karena pada umumnya masyarakat miskin mengkonsumsi jumlah kalori dan protein yang lebih rendah daripada masyarakat mampu³. Pada kondisi itu, beras memainkan peranan utama dalam pengeluaran golongan miskin yang

³ Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan. Hal 275

akan berpengaruh besar terhadap daya beli golongan tersebut⁴. Berdasarkan data Bundel garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), atau garis kemiskinan alternatif seperti Bank Dunia dan LPEM-UI, menunjukkan sekitar 60-65 persen pengeluaran untuk makanan dari kelompok miskin berasal dari beras⁵. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan pokok berupa beras bagi masyarakat miskin, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin merupakan bagian dari tanggung jawab negara Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, "*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*". Dan ayat 2 yang berbunyi "*Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*".

Guna melaksanakan kewajiban negara Indonesia tersebut, maka pemerintah perlu membuat kebijakan atau program nasional yang berkaitan dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kebijakan tersebut bertujuan agar kalangan masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Guna menanggulangi tingkat kemiskinan di Indonesia, kebijakan tersebut diarahkan berdasarkan pada dua pendekatan: *pertama*, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar manusia dengan memberikan berbagai subsidi; *kedua*, memperbesar kemampuan ekonomi masyarakat dengan menciptakan

⁴ Tirtosudiro, Achmad. 1997. Pembangunan Ekonomi Nasional. Jakarta: Intermasa. Hal 199

⁵ Tim Pengkajian Kebijakan Perberasan Nasional. 2001. Bunga Rampai Ekonomi Beras. Jakarta: LPEM-UI. Hal 173

lapangan kerja dan memperbesar akses berusaha, khususnya kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UKM).⁶

Salah satu implementasi dari pendekatan pertama tersebut, diwujudkan melalui program nasional yang dinamakan program raskin (beras untuk rumah tangga miskin). Program raskin merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.⁷ Program raskin mendeskripsikan bahwa seluruh rumah tangga miskin adalah rumah tangga sasaran, sehingga program tersebut diorientasikan untuk menyerap seluruh rumah tangga miskin di berbagai daerah. Semakin banyak rumah tangga miskin di suatu daerah, maka semakin banyak pula bantuan raskin yang diterima oleh daerah tersebut. Hal ini lah yang melatar belakangi perbedaan pembagian jatah raskin di berbagai daerah.

Inpres Nomor 1 Tahun 2008 tentang kebijakan perberasan, mengintruksikan bahwa; menteri dan kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog (Badan Urusan Logistik), diintruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi masyarakat miskin dan rawan pangan.

⁶ Sumber : Laporan Akhir Kegiatan Program Raskin, BPMKP. 2009

⁷ Ibid hal 5

Kecamatan Serang merupakan salah satu kecamatan di Kota Serang, Provinsi Banten yang turut berpartisipasi dalam melaksanakan program raskin, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di daerahnya. Peranan kecamatan tidak terlepas dari banyaknya masyarakat miskin yang perlu diperhatikan tingkat kesejahteraan hidupnya. Menurut data yang bersumber dari Pengawas PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kecamatan Serang, tentang Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Serang tahun 2008, menunjukkan bahwa jumlah keluarga Pra Sejahtera mencapai 6.247 KK⁸.

Adapun pedoman pelaksanaan program raskin di Kecamatan Serang pada tahun 2009 didasari atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
5. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional
6. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan untuk Rumah Tangga Sasaran

⁸ Kecamatan Serang Dalam Angka 2009, BPS Kota Serang

7. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat
8. Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B.18/KMK/DEP II/I/2009 tanggal 08 Januari 2009 Perihal Pagu Raskin tahun 2009.
9. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 511.1/Kep.36-Huk/2009 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Raskin Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten tahun 2009.
10. Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 465/Kep.20-org/2009 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Raskin Untuk Kecamatan Se-Kota Serang Tahun 2009.

Landasan hukum tersebut merupakan acuan dari Kecamatan Serang dalam melaksanakan program raskin, guna dapat mensinergikan antara upaya penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pusat, provinsi hingga di tingkat kecamatan. Berdasarkan atas data dan informasi yang diperoleh peneliti selama proses observasi dan wawancara awal kepada sejumlah kelurahan di Kecamatan Serang, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat miskin terkait dengan pelaksanaan program raskin, antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Sebagian besar kelurahan di Kecamatan Serang belum mampu menerapkan kriteria penerima raskin berdasarkan kriteria nasional,⁹ yang berasal dari rumah tangga miskin menurut Tim Koordinasi Pusat Pemberian Subsidi Langsung Tunai, atau sesuai dengan kriteria rumah tangga miskin menurut Program Jamkesmas, yang terdiri dari empat belas syarat yang harus dipenuhi dalam penetapan rumah tangga miskin. Empat belas syarat tersebut antara lain, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain, serta bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. Dasar penentuan penerima raskin lebih menggunakan data penerima raskin tahun sebelumnya, yang juga berdasarkan atas pertimbangan RT/RW setempat yang dinilai cukup mengetahui kondisi perekonomian warganya.

Alasan mengapa kriteria penerima raskin dinilai sulit diterapkan karena; *pertama*, kondisi kehidupan warga masyarakat yang mengalami perubahan setiap tahunnya, sehingga pihak kelurahan merasa kesulitan untuk mencari penerima raskin yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud¹⁰. Kriteria penerima raskin dinilai sudah tidak mampu menjawab kondisi kehidupan masyarakat saat ini, yang layak untuk menerima beras subsidi. Oleh sebab itu, tidak heran banyak ditemukan penerima raskin yang tidak termasuk dalam salah satu syarat, misalnya jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, dan tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.

⁹ Sumber : Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Kelurahan, Kasi Ekbang, Kasi Kessos Se-Kecamatan Serang.

¹⁰ Ibid

Kedua, masih ditemukannya beberapa kelurahan yang belum menerapkan kriteria penerima raskin berdasarkan atas kriteria nasional. Hal tersebut disebabkan karena minimnya sosialisasi kriteria program kepada pihak kelurahan. Kurangnya sosialisasi menyebabkan beberapa kelurahan tidak mengetahui apa yang menjadi syarat penerima raskin secara nasional, melainkan lebih menggunakan data lain yang dinilai cukup menunjang untuk menentukan kriteria penerima raskin, seperti mengacu kepada data yang digunakan oleh tim kader posyandu setempat, atau lebih mempercayakan persoalan teknis penentuan penerima raskin kepada RT/RW setempat yang lebih didasarkan pada pemikirannya saja¹¹.

Perlu dipahami bahwa yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program raskin adalah masyarakat miskin yang masuk dalam kriteria penerima raskin berdasarkan atas kriteria nasional, namun beberapa fakta ditemukan, bahwa adanya penerima raskin yang diduga tidak memenuhi salah satu syarat pada kriteria tersebut. Peristiwa tersebut banyak terjadi di sebagian besar kelurahan di Kecamatan Serang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor kecemburuan sosial dari masyarakat lain, yang juga ingin mendapat beras subsidi murah jika dibandingkan dengan harga beras di pasaran. Dengan kata lain, program raskin tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar tergolong rumah tangga sasaran, melainkan juga dinikmati oleh sebagian masyarakat yang dinilai tidak memenuhi standar kriteria nasional.¹²

¹¹ Ibid

¹² Ibid

Dengan adanya beberapa perubahan yang terjadi pada pelaksanaan program raskin, ternyata cukup memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat miskin. Misalnya persoalan mengenai adanya perubahan biaya yang dibebankan masyarakat miskin untuk membeli beras subsidi, yang pada mulanya dikenakan biaya Rp 1.000/Kg, kemudian bertambah menjadi Rp 1500/kg, hingga meningkat kembali menjadi Rp 1.600/kg. Jika masing-masing kepala keluarga ditentukan pagu beras raskin dengan jumlah 15 kg/bulan dengan Rp 1.600/kg, maka per bulan masyarakat miskin harus mampu membeli beras subsidi dengan biaya Rp 24.000/KK. Beberapa kelurahan di Kecamatan Serang, masyarakat miskin merasa terbebani dengan biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka setiap bulannya.¹³ Di satu sisi, mereka membutuhkan beras sebagai makanan pokok untuk menjaga keberlangsungan hidup, namun di sisi lain mereka tak mampu berbuat banyak dengan biaya yang harus mereka keluarkan untuk membeli beras subsidi tersebut. Akhirnya keluarga miskin lebih memilih membeli beras raskin sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki, walau dirasa hal tersebut kurang memenuhi kebutuhan pokoknya.

Bulog dalam hal ini memiliki peranan penting dalam menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi masyarakat miskin dan rawan pangan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kecamatan Serang. Dalam proses penyediaan dan pendistribusian beras raskin kepada masyarakat miskin melalui kecamatan, merupakan tanggung jawab yang diemban oleh Bulog.

¹³ Ibid

Beberapa informasi yang didapat bahwa, sebagian besar masyarakat miskin di Kecamatan Serang mengeluh dengan kualitas beras yang buruk, kotor, berwarna dan cepat busuk, sehingga tidak sedikit dari beberapa kelurahan yang mengembalikan dan menukarkan beras dengan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, namun upaya tersebut sia-sia karena pihak Bulog hanya memindahkan beras dengan karung yang berbeda.¹⁴ Kualitas beras raskin dinilai tidak sesuai dengan beras standar yang menjadi kriteria beras raskin nasional, yakni beras berkualitas medium dalam kondisi baik dan tidak berhama.¹⁵

Ketidaksesuaian mutu beras raskin tersebut, menjadikan masyarakat miskin tidak dapat berbuat banyak selain daripada menerima kondisi beras. Selain itu, persoalan lain yang terjadi pada saat proses pendistribusian beras, adalah seringkali terjadi pengurangan jatah beras yang lebih disebabkan oleh ketidak hati-hatian Bulog dalam menjaga keberadaan beras selama proses pendistribusian, sehingga terkadang karung beras mengalami kebocoran. Hal tersebut cukup berpengaruh bagi kelurahan dalam membagi jatah beras raskin kepada pihak RT/RW. Permasalahan lain yang muncul adalah pada saat proses pengiriman beras dilakukan di luar jam kantor, yang menyebabkan pihak kelurahan merasa kewalahan dalam melayani pengiriman beras kepada RT/RW.

Adanya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor : 511.1/Kep.36-Huk/2009 dan Surat Keputusan Walikota Serang Nomor

¹⁴ Ibid

¹⁵ Laporan Akhir Kegiatan Program Raskin, BPMKP Kota Cilegon, 2009

465/Kep.20-Org/2009 mengenai Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN). Surat Keputusan tersebut menunjukkan, adanya pengurangan jatah penerima raskin pada tahun 2009 dari tahun sebelumnya sebesar 5-10 persen. Adanya pengurangan jatah raskin tersebut, cukup dikeluhkan oleh warga karena terdapat beberapa persoalan yang muncul, yaitu: *pertama*, berdasarkan fakta dan informasi yang ditemukan di lapangan, bahwa sebagian besar masyarakat miskin di Kecamatan Serang tidak terserap seluruhnya oleh adanya pengurangan jatah raskin.¹⁶ Kondisi tersebut menjadikan pihak kelurahan hingga RT/RW harus mampu menghindari terjadinya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat miskin, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik. *Kedua*, adanya pengurangan jatah raskin, berimbas pada sulitnya pihak kelurahan dalam memberikan informasi kepada rumah tangga miskin mengenai penyebab pengurangan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor : 511.1/Kep.36-Huk/2009 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2009 yang menetapkan masing-masing kepala keluarga memperoleh subsidi beras 15 kg/KK selama 12 bulan, dimulai bulan Januari sampai bulan Desember 2009. Namun, dengan adanya pengurangan penerima jatah raskin tersebut, menyebabkan beberapa kelurahan dan RT/RW di Kecamatan Serang melakukan pengurangan jatah raskin kepada masing-

¹⁶ Sumber : Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Kelurahan, Kasi Ekbang, Kasi Kessos Se-Kecamatan Serang.

masing kepala keluarga miskin, yang seharusnya menerima beras subsidi sebesar 15 kg/KK menjadi kurang dari 5 liter/KK.¹⁷ Hal tersebut dilakukan sebagai upaya kelurahan dan RT/RW untuk menghindari kecemburuan sosial antara masyarakat miskin di wilayahnya sehingga tidak berujung konflik. Pihak kelurahan lebih mengedepankan prinsip keadilan secara merata, walaupun sebenarnya hal tersebut dapat membebani masyarakat miskin, yang memang mengandalkan beras raskin untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Berdasarkan SK Walikota Serang Nomor: 465/Kep.20-Org/2009 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kota Serang Tahun 2009 memutuskan bahwa, perlu dibentuk tim koordinasi program beras rumah tangga miskin yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Mahasiswa, oleh masing-masing kecamatan, kelurahan dan kepala Desa se-Kota Serang. Pembentukan tim koordinasi tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran beras raskin. Namun, berdasarkan atas data yang diperoleh oleh peneliti, menemukan bahwa pembentukan tim koordinasi raskin di beberapa kelurahan di Kecamatan Serang tidak melibatkan unsur-unsur yang sebagaimana ditetapkan melalui SK Walikota Serang, melainkan lebih beranggotakan pada struktur fungsional internal dari pihak kelurahan itu sendiri.¹⁸

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Berdasarkan Atas Keputusan masing-masing Kelurahan se-Kecamatan Serang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin.2009

Pada proses pengiriman beras dari kelurahan kepada rumah tangga sasaran, ditemukan pungutan lain yang dibebankan kepada penerima raskin untuk biaya transportasi, misalnya becak. Maka, biaya yang dikenakan kepada warga penerima raskin bertambah Rp 400,- menjadi Rp 2.000/kg.¹⁹ Hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, mengingat pendapatan masyarakat miskin yang masih tergolong rendah dan seharusnya biaya tersebut dibebankan kepada pemerintah terkait, karena pada Surat Keputusan Walikota Serang Nomor 465/Kep.20-Org/2009 mengenai Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Untuk kecamatan se-Kota Serang, menetapkan bahwa biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2009.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat miskin mengenai pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Serang, tentu harus mampu dijawab oleh pihak terkait dalam hal ini khususnya pihak kecamatan dengan upaya-upaya yang ditekankan pada adanya perbaikan-perbaikan secara komprehensif.. Sehingga berdasarkan atas latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti akan mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Di Kecamatan Serang, Kota Serang Tahun 2009”**.

¹⁹ Sumber: Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Kelurahan, Kasi Ekbang, Kasi Kessos Se-Kecamatan Serang.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang masalah, maka peneliti melakukan identifikasi masalah yang terdapat dalam pelaksanaan program raskin yakni, sebagai berikut :

1. Masih belum diterapkannya kriteria penerima raskin berdasarkan kriteria keluarga miskin menurut program Jamkesmas, Tim Koordinasi Pusat Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin, serta menurut Badan Pusat Statistik (BPS) secara merata di sejumlah kelurahan di Kecamatan Serang.
2. Adanya kecemburuan sosial yang terjadi pada kalangan masyarakat lain dalam proses penerimaan beras raskin.
3. Tingkat daya beli rumah tangga miskin relatif rendah terhadap beras subsidi, karena penghasilan keluarga yang tidak sebanding dengan biaya yang harus dibayar untuk membeli beras raskin.
4. Kualitas beras raskin tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh rumah tangga sasaran.
5. Tidak terserapnya sebagian rumah tangga miskin yang menjadi rumah tangga sasaran, yang didasari atas terbitnya Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 465/Kep.20-Org/2009 mengenai Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Untuk kecamatan se-Kota Serang.
6. Terjadinya pengurangan jatah beras subsidi kepada masing-masing kepala keluarga sasaran, yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan

Walikota Serang Nomor : 465/Kep.20-Org/2009 mengenai Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) untuk Kecamatan Se-Kota Serang.

7. Tidak dilibatkannya unsur-unsur lain dalam pelaksanaan program raskin, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, (LSM) dan Mahasiswa, sebagaimana yang telah diputuskan melalui Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 465/Kep.20-Org/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi di beberapa kelurahan, Kecamatan Serang.
8. Adanya pungutan lain diluar dari biaya yang seharusnya dikenakan kepada rumah tangga sasaran dalam membeli beras subsidi tersebut.

Setelah melakukan identifikasi beberapa masalah yang terdapat dalam pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Serang, maka peneliti melakukan batasan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut; Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang, Kota Serang Tahun 2009.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dibuat oleh peneliti, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut; Sejauhmanakah Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang, Kota Serang Tahun 2009?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji masalah yang timbul seiring dengan adanya program raskin. Namun, secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang, Kota Serang Tahun 2009.

E. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi ilmu administrasi negara, sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah yang bisa dijadikan bahan referensi dalam penelitian sosial lainnya yang saling berkaitan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan pula bermanfaat bagi studi ilmu pengetahuan lainnya sebagai pengembangan disiplin ilmu sosial, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi peneliti dari hasil penelitian ini adalah dapat memperkaya pengetahuan yang luas mengenai masalah yang diteliti, dan dapat mendeskripsikan temuan dan fakta di lapangan dengan pemikiran teoritis peneliti sendiri. Kemudian manfaat praktis dari hasil penelitian bagi pemerintah adalah sebagai bahan referensi dan masukan, untuk memberikan

penilaian dan mengkaji hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Manfaat praktis dari hasil penelitian bagi pelajar adalah dapat dijadikan bahan referensi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memperkaya wawasan pengetahuan pelajar lainnya dalam menganalisis hasil penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini dibagi ke dalam lima bagian yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bagian yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian kemudian identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis serta sistematika penulisan.

BAB II : DESKRIPSI TEORI

Pada bab ini terdiri dari deskripsi teori, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Deskripsi teori memaparkan pendapat para ahli tentang teori yang berkaitan dengan teori Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009. Selanjutnya, kerangka berpikir menggambarkan tentang alur pemikiran peneliti dalam penelitian ini, yang kemudian coba disimpulkan oleh peneliti sebagai jawaban sementara tentang penelitian tersebut dalam hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menggambarkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian instrumen penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengolahan dan analisis data serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi obyek penelitian, deskripsi data, kemudian dilakukan pengujian hipotesis dan ditafsirkan data tersebut dalam bentuk interpretasi hasil penelitian, serta dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang hasil penelitian ini. Deskripsi obyek penelitian memaparkan tentang obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian dengan jelas, struktur organisasi dari populasi/sampel yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Sementara, deskripsi data menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan. Kemudian dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis statistik yang sudah ditentukan. Hasil perhitungan akhir statistik dilaporkan dalam bentuk batang tubuh, sedangkan perhitungan selengkapnya ditempatkan dalam lampiran. Kemudian dilakukan penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis. Setelah itu dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan yang menyimpulkan hasil penelitian secara singkat, jelas serta sesuai dengan permasalahan dan hipotesis penelitian. Serta saran yang berisi masukan dari peneliti terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis dan praktis.

BAB II

DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Deskripsi Teori

Secara umum, ilmu administrasi negara dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mengkaji dan mempelajari seluruh aktivitas negara dalam menjalankan urusan pemerintahannya, untuk melayani masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Aktivitas-aktivitas tersebut, meliputi berbagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Terdapat beberapa ahli yang mencoba memberikan definisi mengenai ilmu administrasi negara diantaranya sebagai berikut.

White mendefinisikan administrasi negara sebagai berikut :

“Sebagai sesuatu yang terdiri dari semua tindakan yang ditujukan kepada pelaksanaan atau pemaksaan kebijaksanaan negara”²⁰.

Sementara, suatu definisi kamus dari ilmu administrasi negara mengartikan administrasi negara sebagai berikut :

“Aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya, dalam arti yang sempit yakni aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman atau khususnya aktivitas-aktivitas badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan”²¹.

²⁰ Dimock dan Dimock. 1992. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 22

²¹ Ibid. Hal 21-22

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan definisi ilmu administrasi negara, yakni sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang seluruh aktivitas negara mencakup lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas pemerintahannya untuk kepentingan masyarakat. Tugas pemerintahan tersebut berupa suatu kebijakan atau program yang dibuat untuk kepentingan masyarakat. Seperti, program raskin sebagai salah satu program nasional yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin akan konsumsi pangan mereka. Keterkaitan antara program raskin dengan ilmu administrasi negara, adalah terletak pada output yang lahir dari aktivitas negara dalam melakukan suatu tindakan. Dimana program raskin merupakan tindakan yang dihasilkan dari aktivitas negara, yang kemudian menjadi bahan kajian atau pembelajaran dalam disiplin ilmu administrasi negara.

1. Konsep Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, *polis* (Negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (Negara), dan akhirnya dalam bahasa Inggris Pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan²². Sehingga kebijakan dapat diartikan sebagai suatu

²² Dunn, William.2000.Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal 51

keputusan yang diambil untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah publik oleh pemerintah atau negara.

Beberapa ahli mencoba untuk memberikan pendapatnya tentang definisi dari kebijakan publik, di dalam bukunya Jones, dikemukakan pendapat Heclo bahwa *“Policy is a course of action intended to accomplish some end.* Selanjutnya Heclo mengemukakan bahwa :

“A policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specified decisions or actions, and such a course has to be perceived and identified by the analyst in questions”.²³.

Sementara, Dye mengutarakan pendapatnya tentang kebijakan publik bahwa :

“Public Policy is whatever governments choose to do or not to do”.²⁴

Selanjutnya, Anderson mengartikan definisi kebijakan publik sebagai :

“Public Policy is a purposive course of action, followed by an actor or a set of actors in dealing with a problem or matter of concern”.²⁵.

Adapun *Public Policy* menurut Easton dapat dirumuskan sebagai berikut :

“The authoritative allocation of value for the whole society-but it turns out that only the government can authoritatively act on the “whole” society, and everything the government choosed to do or not to do result in the “allocation of values”.²⁶

²³ Soenarko.2003.Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University Press.Hal 40

²⁴ Syafiie, Kencana, Inu, Djamaludin Tandjung & Supardan Modeong. 1999. Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta. Hal 106-107

²⁵ Soenarko.2003.Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University Press. Hal 42

²⁶ Thoha, Miftah. 2005. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 62

Dari definisi-definisi tersebut yang telah digambarkan menurut para ahli mengenai kebijakan publik, tentu kita mendapatkan pengetahuan pokok yang dapat dikembangkan lebih lanjut mengenai definisi kebijakan publik. Dengan definisi-definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pelaku kebijakan berupa suatu tindakan, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam proses penyelesaian masalah-masalah publik yang menjadi kepentingan masyarakat.

Hogwood dan Gunn (1984:13-19), menyebutkan 10 penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern²⁷ sebagai berikut :

- a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
- b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
- c. Sebagai proposal spesifik
- d. Sebagai keputusan pemerintah
- e. Sebagai otorisasi formal
- f. Sebagai sebuah program
- g. Sebagai output
- h. Sebagai hasil (*outcome*)
- i. Sebagai teori atau model
- j. Sebagai sebuah proses

Penggunaan istilah kebijakan yang dapat diartikan sebagai sebuah program dalam pengertian modern, merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pelaku kebijakan yang berperan dalam menyelesaikan suatu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kebijakan diarahkan pada terpenuhinya kepentingan masyarakat yang meliputi keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan serta pendapat-pendapat yang dikehendaki.

²⁷ Parsons, Wayne. 2008. Public Policy. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 15

2. Konsep Evaluasi Kebijakan

a. Definisi Evaluasi Kebijakan

Secara umum, istilah evaluasi dapat diartikan sama dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka, (*rating*) dan penilaian (*assessment*), serta kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Evaluasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai salah satu unsur fungsional dari kegiatan pengambilan kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan dari suatu program atau kebijakan pemerintah. Tujuan dari evaluasi adalah untuk memperoleh hasil (*outcome*) yang sebaik-baiknya dengan jalan dan cara yang seefisien mungkin dalam perkembangan masyarakat. Terdapat beberapa para ahli yang memberikan pendapatnya mengenai evaluasi kebijakan yakni :

Jones memberikan arti terhadap evaluasi kebijakan, yakni :

“Evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation”.²⁸

Anderson mengemukakan tentang evaluasi, bahwa :

“Policy Evaluation, as a functional activity, is as old as policy itself. Policy-makers and administrators have always made judgments concerning the worth or effect of particular policies, programs, and project”.²⁹

Lester dan Stewart memberikan definisi tentang evaluasi kebijakan, yaitu :

“Evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan”.³⁰

²⁸ Soenarko.2003. Kebijakanaksanaan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University Press. Hal 211

²⁹ Ibid.Hal 212

³⁰ Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung:AIPI. Hal 175

Sementara, Dye memberikan definisi evaluasi kebijakan secara luas yakni :

“Evaluasi Kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai”.³¹

Dari beberapa ahli yang memberi definisi mengenai evaluasi kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan dalam rangka memberikan penilaian secara sistematis, objektif, dan empiris terhadap kebijakan atau program publik sebagai bentuk penyempurnaan pelaksanaan kebijakan publik.

Anderson membagi evaluasi kebijakan publik menjadi tiga tipe yaitu, diantaranya³² :

- 1) Evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional.
- 2) Evaluasi yang memfokuskan kepada bekerjanya kebijakan.
- 3) Evaluasi kebijakan melihat secara obyektif dan sistematis terhadap program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauhmana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan tercapai.

Dari penjelasan di atas, evaluasi kebijakan publik ditempatkan pada suatu kegiatan yang difokuskan dalam memberikan penilaian yang sistematis dan obyektif, dalam mengukur dampak dari kebijakan dan pencapaian kerja kebijakan terhadap tujuan-tujuan yang telah digariskan. Sehingga pelaksanaan kebijakan di lapangan dapat bersinergi dengan konsep pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan sebagai capaian-capaian program kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan perlu ditempatkan pada bagian terpenting di dalam melihat

³¹ Parsons, Wayne. 2008. Public Policy. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 547

³² Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik: Gramedia. Hal 199

dan memberikan penilaian terhadap program kebijakan, agar segala bentuk penyimpangan atau kelemahan di dalam alur pelaksanaan kebijakan dapat diminimalisir dengan baik.

b. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan diantaranya, yakni sebagai berikut. *Pertama*, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah tercapai. *Kedua*, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. *Ketiga*, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi³³.

³³ Dunn, William.2000.Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal 609-610

Tabel 2.1
Kriteria Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai ?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat di distribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?

Sumber : Dunn., 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Hal 610

Berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dalam memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Perataan berkenaan dengan suatu kebijakan yang akibat atau usahanya secara adil didistribusikan secara merata. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Ketepatan (*appropriateness*) berkenaan pada

nilai atau harga dari tujuan program, dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

c. Pendekatan Terhadap Evaluasi Kebijakan

Terdapat beberapa pendekatan terhadap evaluasi kebijakan, yang dapat digunakan untuk memahami dan mengartikan konsep evaluasi kebijakan, yakni diantaranya sebagai berikut.³⁴

- 1) Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*), adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya, mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan karena ukuran tentang manfaat dan nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*Selfevident*) atau tidak kontroversial. Evaluasi semu hanya mengungkap informasi-informasi mengenai hasil kebijakan secara valid, dan dapat dipercaya tanpa menjelaskan secara lebih jelas mengenai manfaat dan nilai dari hasil kebijakan tersebut.
- 2) Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*), merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya, mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal

³⁴ Dunn, William.2000.Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal 611-619

adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Evaluasi formal lebih mengarah pada bagaimana evaluasi yang dilakukan mengacu pada tujuan program kebijakan untuk memperoleh informasi mengenai hasil kebijakan yang valid.

- 3) Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*), adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid, mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Pada evaluasi ini, tujuan dan target dari para pembuat kebijakan merupakan salah satu sumber nilai karena semua pihak yang mempunyai andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target, dimana kinerja nantinya akan diukur.

3. Konsep Pelaksanaan Kebijakan Publik

Konsep pelaksanaan atau implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang berorientasi pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Secara sederhana, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa ahli yang mencoba memberikan batasan pengertian mengenai definisi implementasi kebijakan yakni sebagai berikut :

Metter dan Horn (1975) memberi definisi implementasi kebijakan sebagai berikut :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”³⁵.

Sementara, Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *“Implementation and Public Policy”* (1983:61) memberikan arti dari implementasi kebijakan sebagai :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”³⁶.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang atau kebijakan yang mengandung sasaran dan permasalahan kebijakan guna dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yakni tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

4. Konsep Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Secara sederhana, evaluasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan salah satu dari kegiatan evaluasi lainnya yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pencapaian kinerja program atau kebijakan terhadap tujuan-tujuan

³⁵ Wicaksono, Widya, Kristian. 2006. Modul Analisis Kebijakan Publik. Hal 71-72

³⁶ Ibid

yang telah digariskan. Oleh sebab itu, Sebagian besar pemahaman evaluasi kebijakan publik berada pada domain ini. Hal ini bisa dipahami, karena memang implementasi merupakan faktor penting dari kebijakan yang harus dilihat dengan benar.

Evaluasi terhadap hasil implementasi kebijakan dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, dan sejauhmana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Sehingga jelas, yang menjadi fokus utama evaluasi implementasi kebijakan adalah dampak atau efek yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan. Menurut Prof. Sofyan Effendi, tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok diantaranya³⁷:

- a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari *outcome*) terhadap variabel independen tertentu.
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri. Organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi *outcome* dari implementasi kebijakan.
- c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan tugas dari pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah, atau variabel lain yang tidak bisa diubah, tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

Ketiga pertanyaan pokok tersebut, sangat erat kaitannya dengan evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan dari sudut pandang implementasi kebijakan publik. Berdasarkan waktu (*timing*) evaluasi,

³⁷ Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik:Gramedia. Hal 194-195

evaluasi implementasi kebijakan publik dibedakan menjadi tiga tahap yaitu³⁸; *pertama*, evaluasi sebelum dilaksanakan atau yang biasa disebut evaluasi summatif. *Kedua*, evaluasi pada waktu dilaksanakan atau yang disebut evaluasi proses, dan *ketiga*, evaluasi setelah dilaksanakan atau yang disebut juga evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan, evaluasi pengaruh kebijakan (*impact*).

Pada penelitian ini, evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi konsekuensi kebijakan. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap dampak yang timbul dari kebijakan raskin. Penilaian tersebut akan menjadi sebuah masukan (*input*) guna menghasilkan suatu proses perbaikan pelaksanaan program raskin yang konstruktif dan berkelanjutan.

5. Konsep Pembangunan Ekonomi

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi sementara, kebijakan merujuk pada kerangka kerja pembangunan yang memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan proyek. Konsep pembangunan ekonomi diarahkan dan diwujudkan dalam upaya meniadakan, setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial yang disebabkan oleh adanya ketimpangan pembangunan

³⁸ Ibid

ekonomi. Seers (1973) menunjuk 3 sasaran utama pembangunan dengan mengatakan bahwa:

*“...what has been happening to poverty ? what has been happening to unemployment ? what has been to inequality? If all three of these have declined from high levels then beyond doubt this has been a period of development for the country concerned. If one or two these central problems have been growing worse, especially if all three have it would be strange to call the result development _even if per capita income double”.*³⁹

Selanjutnya, definisi pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima oleh para ahli adalah sebagai berikut :

“Suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang”.⁴⁰

Terdapat beberapa paradigma baru yang muncul berdasarkan pendapat para ahli mengenai konsep pembangunan, yang dijadikan sebagai strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesempatan kerja, pemerataan, pengentasan kemiskinan, serta kebutuhan pokok. Diantaranya yaitu meliputi strategi pertumbuhan dengan distribusi, strategi kebutuhan pokok (*Basic Needs*), strategi pembangunan mandiri, strategi pembangunan berkelanjutan (*Sustanaible Development*), serta strategi berdimensi etnik. Diantara beberapa strategi tersebut, strategi kebutuhan pokok merupakan strategi yang dapat memberikan “jaminan” agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mendapat manfaat dari setiap program pembangunan. Oleh karena itu, konsep

³⁹ Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hal 10

⁴⁰ *Ibid.* Hal 17

kebutuhan pokok harus dipandang sebagai dasar utama dalam strategi pembangunan ekonomi dan sosial.

6. Deskripsi Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

Komitmen bangsa dan rakyat Indonesia untuk meningkatkan harkat dan martabat warga negara miskin tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Kemiskinan pada hakikatnya merupakan faktor pendorong tumbuh kembangnya berbagai permasalahan sosial di tanah air. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian, dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak. Definisi fakir miskin lainnya adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan⁴¹.

Kemiskinan ditandai oleh berbagai keterbatasan yang mengakibatkan rendahnya kualitas kehidupan, seperti; rendahnya penghasilan, terbatasnya pemilikan rumah tinggal yang tidak layak huni, pendidikan, keterampilan yang rendah, hubungan sosial dan akses informasi terbatas, kondisi tersebut secara potensial akan menjadi faktor tumbuh kembangnya berbagai permasalahan sosial. Tentu, persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang tidak dikehendaki oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena kesejahteraan sosial merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Serta membuat rakyat Indonesia merasa

⁴¹ Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia. Hal 144-145

hidup dalam alam yang adil dan makmur, dapat merasakan keadilan dalam hidupnya serta terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam⁴².

Sharp, et.al (1996:h.173-191) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yakni sebagai berikut.

Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal⁴³.

Tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat kategori yakni sebagai berikut⁴⁴ :

- a. Kemiskinan Absolut, merupakan keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang, atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain.
- b. Kemiskinan Relatif, merupakan keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok, dibandingkan dengan “kondisi umum” suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp 100.000,- per kapita per bulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan Rp 125.000,- per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp 200.000,- per orang per bulan, maka secara relatif orang tersebut termasuk orang miskin.
- c. Kemiskinan Kultural, mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern).
- d. Kemiskinan Struktural, yakni kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidak-beresan atau ketidak-adilan struktur baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

⁴² Hatta, Mohammad. 2002. Satu Abad Bung Hatta. Jakarta: UI Press. Hal 191

⁴³ Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hal 107

⁴⁴ Suharto, Edi. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal 17-18

Sementara, kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan nasional dalam pengentasan kemiskinan, perlu dimaknai sebagai tolak ukur dari keberhasilan pembangunan nasional. Maka, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial memberikan batasan mengenai definisi kesejahteraan sosial yakni :

“Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”⁴⁵.

Kesejahteraan sosial dimaknai sebagai suatu bentuk perwujudan kehidupan masyarakat yang menikmati adanya ketentraman, terhadap berbagai hal menyangkut aspek rohaniah dan batiniah. Selain itu, kesejahteraan sosial dimaknai juga sebagai suatu cita-cita yang lahir melalui tercapainya kemakmuran (*prosperity*) yang berkeadilan (*justice*)⁴⁶. Sehingga kesejahteraan sosial haruslah dapat melahirkan suatu keadaan masyarakat yang merasakan keadilan secara merata dan kemakmuran dari segala aspek kehidupannya.

⁴⁵ Ibid. Hal 33-34

⁴⁶ Basri, Faisal. 2002. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga. Hal 113

7. Konsep Program Raskin

Program raskin merupakan salah satu program nasional yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Program raskin mensyaratkan kategori rumah tangga miskin berdasarkan kriteria nasional, yang ditetapkan sebagai standar kapasitas layak atau tidaknya seseorang dalam menerima bantuan beras raskin. Program raskin dibuat, sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata termasuk didalamnya masyarakat miskin sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Konsep program raskin seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, memberi arti bahwa rumah tangga sasaran merupakan rumah tangga miskin yang berada di wilayah administratif yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga program raskin difokuskan untuk mampu menyerap seluruh masyarakat miskin di berbagai daerah.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan program raskin di Kota Serang, Provinsi Banten diatur oleh: Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor : 511. 1/Kep. 36 – Huk/ 2009 dan Surat Keputusan Walikota Serang Nomor: 465/ Kep. 20-Org/ 2009 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin). Pelaksanaan kegiatan dalam mekanisme program raskin didasarkan atas dua proses yang berlangsung⁴⁷, di antaranya sebagai berikut :

⁴⁷ Sumber : Laporan Akhir Kegiatan Program Raskin Kota Cilegon. 2009

a. Mekanisme Pendistribusian

- 1) Walikota Serang melalui Ketua Tim Koordinasi Raskin tingkat Kota Serang/ Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Serang mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre Bulog Wilayah I Banten berdasarkan SPA dari kecamatan.
- 2) Berdasarkan SPA, Kasubdivre Bulog Wilayah I Banten menerbitkan SPPB (Surat Perintah Pengajuan Beras) atau DO beras untuk masing-masing kelurahan kepada Satker (satuan kerja) raskin pada saat beras akan disalurkan ke titik distribusi.
- 3) Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang penyimpanan Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras raskin kepada Pelaksana di titik distribusi (kelurahan).
- 4) Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai penerima manfaat raskin.
- 5) Penyerahan beras di titik distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan pelaksanaan distribusi yang menerima raskin serta diketahui oleh Lurah /Kepala Desa.

b. Mekanisme Pembayaran

- 1) Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) raskin dari rumah tangga sasaran penerima manfaat kepada pelaksana distribusi RT/RW dan dari pelaksana distribusi tersebut dilanjutkan kepada Satker kelurahan yang pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp 1.600/Kg.
- 2) Uang HPB raskin yang diterima pelaksana distribusi di tingkat kelurahan diserahkan kepada Satker raskin tingkat kecamatan dengan dibuat tanda terima pembayaran.
- 3) Satker Raskin tingkat kecamatan membayar kemudian membayar ke Sub Divre Wilayah I Banten melalui Bank Bukopin dengan Kode Rekening 1.001.424.251.
- 4) Tanda bukti pembayaran dari Bank Bukopin (*Copy*) harus dilaporkan kepada tim Satker Raskin tingkat Kota Serang dalam Lampiran SPA.

Dalam penetapan penerima raskin, terdapat beberapa kriteria kelompok sasaran program raskin yang didasarkan pada kriteria rumah tangga miskin nasional diantaranya, sebagai berikut⁴⁸ :

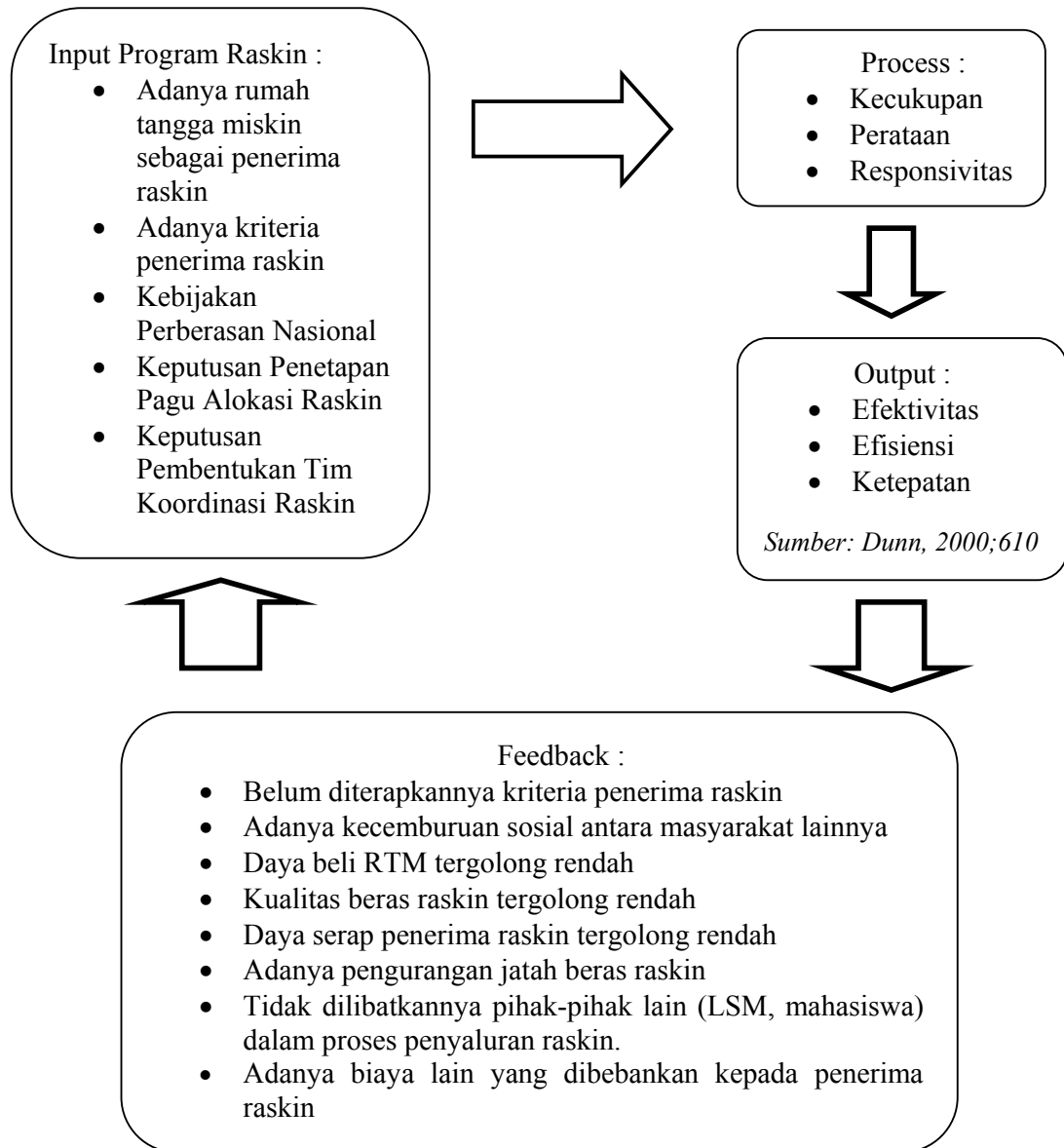
⁴⁸ Kriteria penerima raskin menurut Tim Koordinasi Pusat Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin dan Badan Pusat Statistik

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan, sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan kurang dari Rp 800.000,-.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yakni tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis membuat sebuah kerangka berpikir yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan konsumsi beras merupakan kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi bagi semua kalangan, termasuk masyarakat miskin di berbagai daerah di Indonesia. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok merupakan cerminan pemerintah dalam membuat suatu program yang dapat meningkatkan pemerataan kebutuhan dasar tersebut. Raskin merupakan salah satu program nasional yang dibuat oleh pemerintah, sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Tujuan tersebut merupakan barometer dari pencapaian tujuan yang harus diwujudkan, ketika program raskin telah digulirkan kepada masyarakat miskin. Sehingga keberhasilan program dapat terealisasi sesuai dengan yang telah direncanakan.

Program raskin yang telah berjalan dengan berbagai perubahan yang terjadi, hendaknya diberikan sebuah penilaian yang obyektif dipandang dari beragam perspektif yang berbeda. Penilaian tersebut dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan-perbaikan program yang konstruktif. Penilaian program tersebut hendaknya harus mengacu dengan kajian teori yang dapat dipertanggung jawabkan secara teoritis, dalam memberikan penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian antara realisasi program terhadap tujuan program.

Input program raskin dijabarkan berdasarkan masukan-masukan program yang menjadi pedoman dalam melaksanakan program raskin, yang kemudian dijadikan sebagai parameter dalam mengukur tingkat kesesuaian antara realisasi program dengan input program. Input program raskin diantaranya meliputi, adanya rumah tangga miskin sebagai penerima raskin, adanya kriteria penerima raskin, adanya kebijakan Perberasan Nasional, adanya Surat Keputusan (SK) Penetapan Pagu Alokasi Raskin dan Pembentukan Tim Koordinasi Raskin.

Setelah masukan program raskin dijabarkan dalam input program, maka *process* yang didalamnya mencakup kecukupan, pemerataan, responsivitas sebagai parameter dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan memfokuskan pada memberikan penilaian program dari segi proses pelaksanaan kebijakan. Kecukupan mengarah kepada seberapa jauh tingkat efektivitas dalam memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah, pemerataan mengarah pada kebijakan yang akibat dan usahanya secara adil didistribusikan secara merata, serta responsivitas mengarah pada seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok masyarakat tertentu.

Selanjutnya, setelah kebijakan melalui tahap *process* adalah output yang meliputi efektivitas, efisiensi, serta ketepatan. Output kebijakan merupakan keluaran atau hasil yang diterima atau diperoleh setelah melalui tahapan *process*. Efektivitas mengarah pada apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, efisiensi mengarah pada jumlah usaha yang diperlukan

untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, serta ketepatan mengarah pada nilai atau harga dari tujuan program. Setelah kebijakan atau program melalui tahapan output, kemudian akan timbul *feedback* dari sasaran program yang dalam hal ini adalah masyarakat miskin sebagai obyek dari program raskin. *Feedback* berupa tanggapan atau penilaian masyarakat mengenai kebijakan yang dirasakan. Dalam hal ini, *feedback* meliputi tidak diterapkannya kriteria penerima raskin, daya serap penerima raskin tergolong rendah, adanya pengurangan jatah beras raskin, daya beli RTM tergolong rendah, kualitas beras raskin tergolong rendah, adanya biaya lain yang dibebankan kepada penerima raskin, adanya kecemburuan sosial antara masyarakat, serta tidak dilibatkannya pihak-pihak lain dalam proses penyaluran raskin.

Tanggapan-tanggapan masyarakat miskin merupakan *feedback* yang perlu menjadi sebuah masukan terhadap pelaksanaan program raskin di Kecamatan Serang. Sehingga perlu adanya upaya-upaya perbaikan pelaksanaan program, untuk dapat menyesuaikan dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya yang termaktub dalam input kebijakan.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan⁴⁹. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Berdasarkan atas rumusan masalah yang telah peneliti buat sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil hipotesis awal yakni;

$$H_a : \mu \geq 62,5\%$$

H_a : “Pelaksanaan Program Raskin Di Kecamatan Serang, Kota Serang Tahun 2009 tercapai lebih dari 62,5 % dari kriteria ideal yang ditetapkan”.

$$H_o : \mu \leq 62,5\%$$

H_o : “Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Serang, Kota Serang Tahun 2009 sebesar 62,5 % dari kriteria ideal yang ditetapkan”.

Melihat dari dua hipotesis tersebut, maka peneliti mengambil salah satu hipotesis penelitian yaitu.

$$H_o : \mu \leq 62,5\%$$

H_o : “Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Serang, Kota Serang Tahun 2009 sebesar 62,5 % dari kriteria ideal yang ditetapkan”.

⁴⁹ Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta. Hal 70

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang sesuai dan tepat dalam penelitiannya. Kesesuaian dan ketepatan data sangat dipengaruhi oleh metode yang dipakai oleh peneliti, sehingga peneliti harus mampu menentukan metode penelitian apa yang tepat dalam penelitiannya. Tujuan dari metode penelitian adalah dapat membantu peneliti dalam menghasilkan penelitian yang objektif, dan dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan atas data yang diperoleh. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain⁵¹. Adapun peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, karena variabel dari penelitian ini bersifat mandiri atau satu variabel, dan hasil penelitian ini nantinya tidak bermaksud untuk dijadikan bahan

⁵⁰ Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta. Hal 1

⁵¹ Ibid. Hal 11

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Sementara, digunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai masalah yang sedang diteliti, dengan jalan mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti melalui kuantifikasi.

B. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati⁵². Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel, dan menggunakan skala Likert dalam pengukuran jawaban dari para responden. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen memiliki tingkatan nilai dari sangat positif sampai sangat negatif.

⁵² Ibid. Hal 119

Sehingga, untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari setiap item instrumen diberi skor, yakni sebagai berikut.

Tabel 3.1
Skoring Item Instrumen

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Untuk mempermudah dalam menemukan jawaban atas masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya, berikut peneliti sajikan operasionalisasi variabel dalam bentuk kisi-kisi instrumen yakni sebagai berikut.

Tabel 3.2
Instrumen Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	No. Item Instrumen
Pelaksanaan Program Raskin	Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kepuasan penerima raskin terhadap kualitas dan kuantitas beras raskin; • Manfaat program raskin terhadap beban masyarakat miskin. 	1,2 3,4
		Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan daya beli dan kesesuaian kualitas beras raskin; • Proses pendistribusian beras raskin.
	Kecukupan		<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan pokok;

		<ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan dan kuantitas beras raskin. 	11,12
	Perataan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan pembagian jatah beras subsidi; • Penyampaian informasi program raskin. 	13,14 15,16
	Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman rumah tangga miskin terhadap pengurangan jatah beras raskin; • Pengetahuan rumah tangga miskin akan kriteria penerima raskin. 	17,18 19,20
	Ketepatan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penerima raskin terhadap kriteria program raskin; • Ketepatan program raskin terhadap masyarakat miskin. 	21,22 23,24

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh peneliti melalui angket (kuesioner), wawancara (*interview*), dan observasi (pengamatan).
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung diperoleh peneliti, namun diperoleh melalui orang lain maupun dokumen seperti, hasil penelitian yang relevan, laporan dan catatan-catatan perusahaan atau melalui informan yaitu, masyarakat yang memberikan keterangan dan informasi kepada peneliti.

b. Sumber Data

- 1) Responden, yaitu masyarakat Kecamatan Serang yang menjadi penerima manfaat program raskin tahun 2009 yang dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penelitian ini, untuk memperoleh gambaran atas materi yang dijadikan objek penelitian.
- 2) Literatur, yaitu data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Secara teknis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya⁵³. Tipe pertanyaan dalam angket dapat dibedakan menjadi dua bentuk yakni, pertanyaan terbuka, adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal dan pertanyaan tertutup, yakni pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode angket dalam bentuk pertanyaan tertutup, dengan pertimbangan keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga

⁵³ Ibid. Hal 162

dan biaya yang dimiliki, alasan lainnya karena dapat membantu responden untuk menjawab dengan cepat. Serta dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul.

b. Metode Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada responden, dengan metode terstruktur untuk mendapatkan gambaran serta informasi yang dibutuhkan sebagai data sekunder guna mendukung data primer yang telah peneliti dapatkan sebelumnya melalui angket.

c. Metode Observasi

Metode observasi merupakan serangkaian pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap subyek atau obyek penelitian melalui mata, telinga, dan perasaan dengan melihat fakta-fakta fisik dari obyek yang diteliti dan mendapat masukan dari pihak-pihak terkait di dalam penelitian ini. Fakta-fakta dan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dicatat dan dirangkum, untuk dijadikan data sekunder sebagai data pendukung primer yang diperoleh dari hasil jawaban responden melalui angket.

d. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang tepat terhadap penelitian ini, menurut beberapa para ahli, yakni dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku, literatur, serta karya ilmiah yang pernah dibuat dan dipublikasikan sebagai bahan referensi yang ada keterkaitan dengan penulisan penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁵⁴. Istilah subyek penelitian menunjuk pada orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang diteliti⁵⁵. Dari penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa populasi tidak hanya meliputi jumlah orang yang berada dalam suatu wilayah namun, populasi meliputi subyek/obyek yang memiliki kualitas nilai dan karakteristik tertentu dari keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. Dari penelitian ini, peneliti mengambil populasi yakni, seluruh masyarakat Kecamatan Serang yang menjadi penerima bantuan raskin pada tahun 2009. Dimana jumlah penerima beras raskin sebanyak 4.904 KK.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel menurut Usman adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan tehnik tertentu yang disebut dengan tehnik sampling. Tehnik sampling berguna agar mereduksi anggota populasi menjadi anggota sampel yang mewakili populasinya (*representatif*), sehingga kesimpulan terhadap populasi dapat dipertanggung jawabkan, lebih teliti menghitung yang sedikit daripada yang banyak, serta menghemat waktu, tenaga dan biaya.⁵⁶ Oleh karena pada penelitian ini, jumlah anggota populasi cukup besar dan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk meneliti seluruh anggota populasi, maka peneliti membutuhkan sampel yang nantinya akan menjadi

⁵⁴ Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta. Hal 90

⁵⁵ Faisal, Sanapiah. 2001. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 109

⁵⁶ Usman. Op. Cit. Hal 44

fokus obyek penelitian yang dianggap dapat merepresentasikan jumlah populasi. Sementara, rumus yang digunakan dalam menghitung jumlah sampel adalah rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Ket :

n = ukuran sampel
 N = ukuran Populasi
 e = Sampling error (tingkat kesalahan)

Diketahui :

N = 4.904 KK
 e = 0,1 (10 %)
 n = ?

Jawab :

$$n = \frac{4.904}{1 + 4.904 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{4.904}{1 + 49,04}$$

$$n = \frac{4.904}{50,04}$$

n = 98 Sampel

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dengan menggunakan rumus Slovin, dapat diketahui bahwa jumlah populasi sebanyak 4.904 KK dengan tingkat kesalahan (*Sampling error*) sebesar 10% (0,1), maka diperoleh hasil sampel sebanyak 98 Sampel. Kemudian, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *proportionate stratified random sampling*. Dimana sampel dihitung berdasarkan ketentuan besaran sampel atas besaran populasi. Teknik ini digunakan karena jumlah populasi terdiri dari sub populasi yang tidak homogen sehingga pada setiap populasi akan diwakili sesuai dengan proporsinya masing-masing dan dapat menghasilkan sampel yang representatif. di bawah ini tabel dari teknik perhitungan sampel penelitian.

Tabel 3.3
Teknik Perhitungan Sampel

Area	Jumlah RTM	Perhitungan	Hasil	Hasil Akhir
Sumur Pecung	393	$\frac{393}{4.904} \times 100\% = 8\% \times 98$	7,8	8
Cipare	541	$\frac{541}{4.904} \times 100\% = 11\% \times 98$	10,7	11
Serang	454	$\frac{454}{4.904} \times 100\% = 9,2\% \times 98$	9	9
Kagungan	433	$\frac{433}{4.904} \times 100\% = 8,8\% \times 98$	8,6	9
Kota Baru	207	$\frac{207}{4.904} \times 100\% = 4,2\% \times 98$	4,1	4
Lopang	346	$\frac{346}{4.904} \times 100\% = 7\% \times 98$	6,8	7
Cimuncang	595	$\frac{595}{4.904} \times 100\% = 12,1\% \times 98$	11,8	12
Unyur	700	$\frac{700}{4.904} \times 100\% = 14,2\% \times 98$	13,9	14
Sukawana	360	$\frac{360}{4.904} \times 100\% = 7,3\% \times 98$	7,1	7
Lontar Baru	159	$\frac{159}{4.904} \times 100\% = 3,2\% \times 98$	3,1	3
Kaligandu	397	$\frac{397}{4.904} \times 100\% = 8\% \times 98$	7,8	8
Trondol	319	$\frac{319}{4.904} \times 100\% = 6,5\% \times 98$	6,3	6
Jumlah	$\Sigma = 4.907$			$\Sigma = 98$

Sumber : Data diolah Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 98 sampel yang tersebar di seluruh area populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random*), dengan cara setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. Kemudian,

diundi sesuai dengan digit jumlah anggota populasi dengan perhitungan angka 0 sampai 9.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Apabila pengumpulan data sudah dilakukan pada tahap sebelumnya, maka data yang sudah terkumpul harus diolah dan dianalisis. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa proses yaitu sebagai berikut :

1. *Editing*. Hal ini berarti bahwa semua data yang diperoleh diteliti tentang kelengkapan dan kejelasan jawaban dari butir-butir pertanyaan yang telah dibuat;
2. *Coding* dan *Scoring*, merupakan usaha mengklasifikasi atau mengelompokkan jawaban responden berdasarkan macamnya, dengan cara memberikan kode terhadap jawaban responden dalam kuesioner sesuai dengan kategori masing-masing, kemudian diberikan skor dengan menggunakan skala *likert*.
3. *Tabulating*. Hal ini berarti menunjuk kepada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu berupa tabel-tabel dalam rangka penginterpretasian data sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

Setelah data selesai diolah, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan upaya peneliti untuk menyederhanakan dan menyajikan data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang berarti, sehingga dapat mudah dipahami dan diinterpretasi oleh pembaca atau penguji.

Dalam metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah dengan metode kuantitatif. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

1. Uji Validitas

Secara mendasar, validitas merupakan keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur⁵⁷. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu (mengukur) valid. Valid diartikan bahwa instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Maka dari itu untuk menguji instrumen penelitian ini agar data yang didapat valid, maka peneliti menggunakan rumus Korelasi Product Moment dengan bantuan piranti lunak *Statistic Program For Social Science (SPSS)* versi 13.

⁵⁷ Arikunto, Suharsimi. 1995. *Manajemen Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal 219

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{[n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2][n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2]}}$$

Keterangan :

- r = Koefisien Korelasi Product Moment
 $\sum X$ = Jumlah Skor Dalam Sebaran X
 $\sum Y$ = Jumlah Skor Dalam Sebaran Y
 $\sum XY$ = Jumlah Hasil Kali Skor X dan Y yang Berpasangan
 $\sum X^2$ = Jumlah Skor yang Dikuadratkan dalam Sebaran X
 $\sum Y^2$ = Jumlah Skor yang Dikuadratkan dalam Sebaran Y
 n = Jumlah Sampel

Menurut Sugiyono⁵⁸, pedoman untuk dapat memberikan interpretasi terhadap tercapainya hipotesis terhadap interval koefisien korelasi, yakni sebagai berikut :

- 0,00 – 0,199 = Sangat tidak tercapai / sangat rendah
 0,20 – 0,399 = Kurang tercapai / rendah
 0,40 – 0,599 = Sedang
 0,60 – 0,799 = Tercapai / kuat
 0,80 – 1,000 = Sangat tercapai / sangat kuat

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan persyaratan pokok kedua dari instrumen pengumpulan data. Hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat kesamaan data

⁵⁸ Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta. Hal 214

dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama pula. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach*, yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0.30⁵⁹. Dengan dilakukan uji reliabilitas, maka akan menghasilkan instrumen yang tepat dan akurat. Apabila koefisien reliabilitas instrumen yang dihasilkan lebih besar, berarti instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik. Pengujian Reliabilitas kuesioner pada penelitian ini menggunakan bantuan piranti lunak *Statistic Program For Social Science (SPSS)* versi 13.

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum Si^2}{\sum St^2} \right)$$

Keterangan :

- n = jumlah butir
 Si² = variabel butir
 St² = variabel total

3. Uji t-test

Pada penelitian ini, data yang diteliti bersifat data interval yaitu data yang jaraknya sama tetapi tidak memiliki nilai nol (0) absolut/mutlak. Kemudian, hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah hipotesis deskriptif, yakni

⁵⁹ Purwanto. 2007. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 181

dugaan terhadap nilai satu variabel secara mandiri antara data sampel dan data populasi. Sehingga untuk melakukan pengujian hipotesis deskriptif dipakai t-test satu sampel dan menggunakan uji pihak kanan, karena t_{tabel} berada di sebelah kanan t_{hitung} .

$$t = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan :

t = nilai t yang dihitung

\overline{X} = nilai rata-rata

μ_0 = nilai yang dihipotesiskan

s = simpangan baku sampel

n = jumlah anggota sampel

E. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Serang, Kota Serang. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan Februari hingga bulan September 2010, sebagaimana pada tabel 3.4 berikut ini :

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Kecamatan Serang merupakan salah satu kecamatan di Kota Serang yang termasuk dalam wilayah Provinsi Banten. Kecamatan Serang memiliki luas wilayah 25,88 km². Kecamatan Serang merupakan pusat wilayah pembangunan bagian pusat Kota Serang. Hal tersebut sesuai dengan potensi daerah dan karakteristik yang dimiliki wilayah ini, dimana sebagian besar leak geografisnya merupakan daerah dataran, maka arah pembangunan jangka panjangnya dititikberatkan pada sektor pengembangan perumahan dan tata kota yang terus dibenahi.

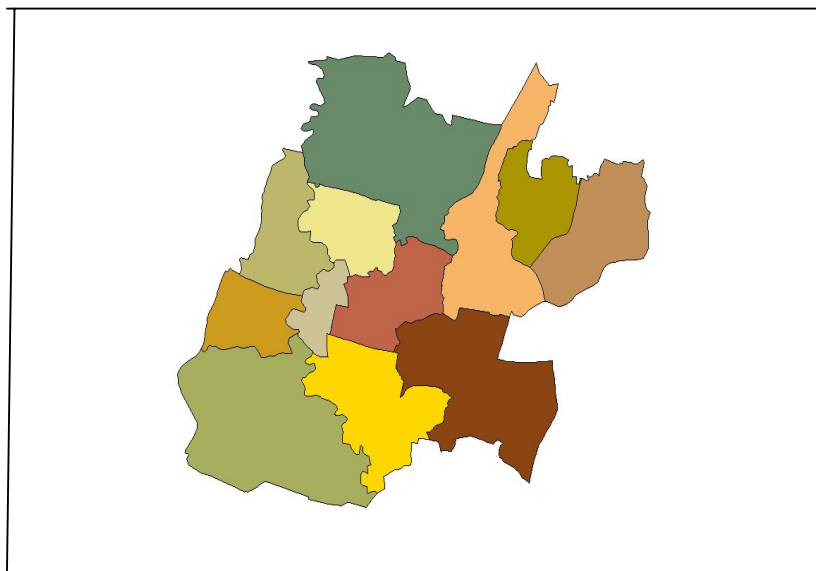
Ibukota Kecamatan Serang terletak pada jarak 1,5 Km dari ibukota Serang. Bentuk topografi wilayah Kecamatan Serang sebagian besar merupakan daratan, dengan ketinggian rata-rata kurang dari 500 m dari permukaan laut, dengan rata-rata curah hujan ± 75 mm/tahun. Berdasarkan ketinggian, curah hujan, suhu, dan kesuburan serta jenis tanah yang dominan, maka daerah ini sangat cocok untuk usaha pemukiman dan perumahan. Secara administrasi wilayah Kecamatan Serang terbagi menjadi 139 Lingkungan, 173 Rukun Warga (RW), 711 Rukun Tetangga (RT).⁶⁰

⁶⁰ BPS Kota Serang. Kecamatan Serang Dalam Angka 2009

Wilayah Kecamatan Serang melintas sebuah sungai yang cukup besar dan terkenal, yaitu Sungai Cibanten yang bermuara di Karangantu yang ada di wilayah Kecamatan Serang. Di Kecamatan Serang juga terdapat tempat ziarah yang juga sangat terkenal, yaitu Banten Girang yang terletak di Kelurahan Cipare yang tepatnya di Jl. Raya Pandeglang. Tempat ziarah ini banyak dikunjungi oleh peziarah baik itu dari daerah Banten sendiri maupun dari luar daerah Banten, serta masih banyak peninggalan sejarah di masa Kesultanan Banten yang ada di wilayah Kecamatan Serang. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Serang sebagai berikut :

1. Utara : Kecamatan Kasemen
2. Selatan : Kecamatan Cipocok Jaya/Taktakan
3. Barat : Kecamatan Taktakan
4. Timur : Kecamatan Cipocok Jaya

Gambar 4.1
Peta Kecamatan Serang



Keterangan warna lokasi :

Hijau	= Wilayah Unyur
Orange	= Wilayah Kaligandu
Kuning gelap	= Wilayah Terondol
Coklat	= Wilayah Sukawana
Hijau gelap	= Wilayah Kagungan
Kuning Terang	= Wilayah Lopang
Merah gelap	= Wilayah Cimuncang
Coklat gelap	= Wilayah Sumur Pecung
Orange gelap	= Wilayah Lontar Baru
Abu-abu	= Wilayah Kota Baru
Kuning	= Wilayah Cipare
Hijau Terang	= Wilayah Serang

1. Gambaran Umum Penduduk Kecamatan Serang

- a. Wilayah Kecamatan Serang secara administratif, terbagi atas dua belas (12) kelurahan yaitu Kelurahan Serang, Kelurahan Cipare, Kelurahan Sumur Pecung, Kelurahan Cimuncang, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Lontar Baru, Kelurahan Kagungan, Kelurahan Lopang, Kelurahan Unyur, Kelurahan Kaligandu, Kelurahan Terondol, dan Kelurahan Sukawana. Berdasarkan jenis kelaminnya, Kecamatan Serang memiliki jumlah penduduk sebanyak 191.840 jiwa yang terdiri dari 94.557 jiwa laki-laki dan 97.283 jiwa perempuan. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Serang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Serang Tahun 2008

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Total
1. Serang	12.346	12.185	24.531
2. Cipare	12.139	11.948	24.087
3. Sumur Pecung	9.972	9.247	19.219
4. Cimuncang	9.752	12.615	22.367
5. Kota Baru	3.382	3.403	6.785
6. Lontar Baru	3.762	3.771	7.533
7. Kagungan	6.566	5.770	12.336
8. Lopang	7.836	7.495	15.331
9. Unyur	15.112	17.788	32.900
10. Kaligandu	8.004	7.600	15.604
11. Terondol	3.171	3.044	6.215
12. Sukawana	2.515	2.417	4.932
Jumlah	94.557	97.283	191.840

Sumber : Kecamatan Serang dalam angka 2009. BPS Kota Serang.

- b. Keseluruhan penduduk di Kecamatan Serang adalah sebagian besar bermata pencaharian pada sektor perdagangan, dan sebagian penduduk lainnya bermata pencaharian pada sektor buruh industri, Jasa Angkutan, serta konveksi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Kepadatan Penduduk dan Mata Pencaharian
Sebagian Besar Penduduk
Kecamatan Serang Tahun 2008

No.	Kelurahan	Rata-rata Jumlah ART	Kepadatan Penduduk Per Km ²	Mata Pencaharian
1.	Serang	4,46	4.258	Buruh Industri
2.	Cipare	4,71	19.279	Buruh Industri
3.	Sumur Pecung	3,45	5.619	Perdagangan
4.	Cimuncang	4,13	13.800	Perdagangan
5.	Kota Baru	4,52	12.461	Perdagangan
6.	Lontar Baru	3,72	7.569	Buruh Industri
7.	Kagungan	4,39	9.568	Perdagangan
8.	Lopang	4,61	13.103	Perdagangan
9.	Unyur	5,09	7.494	Perdagangan
10.	Kaligandu	4,79	5.413	Jasa Angkutan
11.	Terondol	4,59	3.453	Buruh Industri
12.	Sukawana	5,61	2.786	Industri (Koveksi)
Jumlah		54,07	104,803	

Sumber : Kecamatan Serang dalam angka 2009. BPS Kota Serang.

- c. Sebagian penduduk di Kecamatan Serang masih mengalami persoalan kemiskinan. Berdasarkan jumlah keluarga menurut tahapan keluarga sejahtera di Kecamatan Serang, jumlah keluarga yang tergolong Pra KS (Keluarga Sejahtera) sebanyak 6.247, jumlah keluarga yang tergolong KS I sebanyak 7.844, jumlah keluarga yang tergolong KS II sebanyak 16.659, jumlah keluarga yang tergolong KS III sebanyak 9.038, serta jumlah keluarga yang tergolong KS III Plus sebanyak 2.280. Berdasarkan data tersebut, program raskin ternyata belum mampu menyerap seluruh jumlah keluarga miskin dengan kategori keluarga Pra keluarga sejahtera (KS). Kategori itu merupakan kategori terendah diantara kategori lainnya menurut

tahapan keluarga sejahtera. Pada tahun 2009 jumlah penerima raskin berjumlah 4.904 rumah tangga miskin, sehingga bila dibandingkan dengan jumlah keluarga Pra KS, maka terdapat selisih yang cukup besar yaitu 1.343 rumah tangga miskin yang tidak terserap oleh program tersebut. Jumlah keluarga menurut tahapan keluarga sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera
Kecamatan Serang Tahun 2008

No.	Kelurahan	Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III Plus
1.	Serang	430	882	992	1.736	726
2.	Cipare	893	625	2.677	1.043	149
3.	Sumur Pecung	746	886	1.292	1.209	208
4.	Cimuncang	935	1.353	1.653	1.024	83
5.	Kota Baru	284	171	295	546	216
6.	Lontar Baru	249	290	202	828	232
7.	Kagungan	522	537	686	742	424
8.	Lopang	551	517	1.642	370	67
9.	Unyur	731	1.387	4.663	557	7
10.	Kaligandu	428	354	1.916	608	152
11.	Terondol	245	522	437	217	11
12.	Sukawana	233	320	204	158	5
Jumlah		6.247	7.844	16.659	9.038	2.280

Sumber: Data PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kecamatan Serang tahun 2008.

2. Gambaran Umum Program Raskin Kecamatan Serang

- a. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan program bantuan beras raskin dari pemerintah. Perolehan jatah beras raskin sangat lah berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga di Provinsi Banten sendiri terdapat perbedaan jumlah alokasi beras pada setiap daerahnya. Perbedaan tersebut tergantung dari seberapa besar tingkat kemiskinannya. Berdasarkan data yang

diperoleh tahun 2009, Provinsi Banten mendapat jumlah bantuan beras raskin sebanyak 114,793,740 Kg, dengan jumlah RTS sebanyak 637,743 yang dialokasikan kepada tujuh kabupaten/kota. Perolehan tersebut cenderung mengalami penurunan pada tahun 2010. Karena pada tahun 2010, Provinsi Banten hanya memperoleh alokasi pagu raskin sebanyak 98,173,608 Kg, dengan Jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) sebanyak 629,318. Jumlah perolehan beras raskin di Provinsi Banten pada tahun 2009, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Daftar Alokasi Pagu Raskin Provinsi Banten Pada Tahun 2009

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah RTS	Pagu (Kg)
1.	Kabupaten Pandeglang	128,869	23,196,420
2.	Kabupaten Lebak	153,626	27,652,680
3.	Kabupaten Tangerang	191,047	34,388,460
4.	Kabupaten Serang	97,254	17,505,720
5.	Kota Tangerang	28,984	5,217,120
6.	Kota Cilegon	16,979	3,256,220
7.	Kota Serang	20,984	3,777,120
Jumlah		637,743	144,793,740

Sumber : SK Gubernur Banten No. 511.1/Kep.36-Huk/2009

- b. Kota Serang merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang mendapat bantuan beras raskin. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2009 Kota Serang mendapat perolehan beras raskin sebanyak 3,777,120 Kg dengan total 20.984 RTS. Perolehan tersebut cenderung mengalami penurunan pada tahun 2010. Pada tahun 2010, Kota Serang hanya mendapat jatah beras raskin sebanyak 3,169,140

Kg dengan total 20,315 RTS. Jumlah perolehan beras raskin di Kota Serang pada tahun 2009, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Daftar Alokasi Pagu Raskin Kota Serang Pada Tahun 2009

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RTM
1.	Serang	12	4.904
2.	Cipocok Jaya	8	2.557
3.	Kasemen	10	6.152
4.	Taktakan	12	1.835
5.	Curug	10	2.801
6.	Walantaka	14	2.735
Jumlah		66	20.984

Sumber : SK Walikota Serang No. 465/Kep.20-Org/2009

- c. Kecamatan Serang merupakan salah satu kecamatan di Kota Serang yang memperoleh bantuan beras raskin sebagaimana yang telah termaktub dalam Surat Keputusan Walikota Serang No. 465/Kep.20-Org/2009 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Kecamatan Se-Kota Serang Pada Tahun 2009. berdasarkan peraturan tersebut, pada tahun 2009 Kecamatan Serang memperoleh bantuan beras raskin sebanyak 73,560 Kg dengan Jumlah RTS sebanyak 4.904. perolehan beras raskin cenderung mengalami penurunan pada tahun 2010 sebanyak 62,296 Kg dengan jumlah RTS sebanyak 4.792. Jumlah perolehan beras raskin di Kecamatan Serang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Daftar Alokasi Pagu Raskin Kecamatan Serang Pada Tahun 2009

No.	Kelurahan	Jumlah RTM
1.	Sumur Pecung	393
2.	Cipare	541
3.	Serang	454
4.	Kagungan	433
5.	Kota Baru	207
6.	Lopang	346
7.	Cimuncang	595
8.	Unyur	700
9.	Sukawana	360
10.	Lontar Baru	159
11.	Kaligandu	397
12.	Trondol	319
Jumlah		4.904

Sumber : Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 465/Kep.20-Org/2009

B. Pengujian Persyaratan Statistik

1. Hasil Uji Validitas

Pada penelitian ini, tahap awal dalam proses analisis data adalah dengan melakukan uji validitas instrumen terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji Validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner yang menjadi alat ukur dalam penelitian ini. Instrumen yang valid menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu dalam mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian, serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep penelitian dengan hasil pengukuran.

Pada uji validitas, peneliti mengambil sampel sebanyak 34 responden terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tidaknya data sebelum data tersebut diolah secara keseluruhan. Selain itu, uji validitas dilakukan agar lebih mengefisienkan waktu dalam pengambilan data di lapangan. Artinya, apabila 34 sampel yang didapat hasilnya valid secara keseluruhan, maka sisa sampel dapat di lanjutkan penyebarannya. Tetapi bila terdapat sampel yang tidak valid dan tidak mewakili indikator yang ada, maka instrumen tersebut diganti dengan instrumen baru sebagai pengganti instrumen yang tidak valid. Kemudian kuesioner tersebut disebar dari awal kembali untuk menghasilkan instrumen yang valid. Tetapi apabila ditemukan hasil sampel yang tidak valid namun, tetap mewakili indikator, maka instrumen tersebut dihapus dan penyebaran kuesioner dapat dilanjutkan tanpa mempertanyakan instrumen yang bersangkutan.

Adapun rumus yang digunakan oleh peneliti dalam uji validitas ini, adalah dengan menggunakan statistik korelasi *product moment* dengan bantuan SPSS statistik versi 13.

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{[n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2] [n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2]}}$$

Keterangan :

- r = Koefisien Korelasi Product Moment
- $\sum X$ = Jumlah Skor Dalam Sebaran X
- $\sum Y$ = Jumlah Skor Dalam Sebaran Y
- $\sum XY$ = Jumlah Hasil Kali Skor X dan Y yang Berpasangan

- $\sum X^2$ = Jumlah Skor yang Dikuadratkan dalam Sebaran X
 $\sum Y^2$ = Jumlah Skor yang Dikuadratkan dalam Sebaran Y
 n = Jumlah Sampel

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan statistik korelasi *product moment* dengan bantuan SPSS statistik versi 13, maka didapat beberapa instrumen yang dinyatakan valid dan tidak valid. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel 4.7
Tabel Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrumen

No.Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keputusan
1	0,565	0,164	Valid
2	0,613	0,164	Valid
3	0,656	0,164	Valid
4	0,449	0,164	Valid
5	0,568	0,164	Valid
6	0,278	0,164	Valid
7	0,304	0,164	Valid
8	0,577	0,164	Valid
9	0,463	0,164	Valid
10	0,477	0,164	Valid
11	0,577	0,164	Valid
12	0,355	0,164	Valid
13	0,568	0,164	Valid
14	-0,256	0,164	Tidak Valid
15	0,463	0,164	Valid
16	0,062	0,164	Tidak Valid
17	0,568	0,164	Valid
18	0,099	0,164	Tidak Valid
19	0,304	0,164	Valid
20	-0,256	0,164	Tidak Valid
21	0,568	0,164	Valid
22	0,304	0,164	Valid
23	0,424	0,164	Valid
24	0,189	0,164	Valid

Sumber : Data diolah tahun 2010

Kriteria item/butir instrumen yang digunakan adalah apabila r hitung $\geq r$ tabel, berarti item/butir instrumen dinyatakan valid. Jika r hitung $\leq r$ tabel, berarti item/butir instrumen dinyatakan tidak valid. Perolehan nilai dari r_{hitung} diperoleh dari perhitungan statistik korelasi *product moment* dengan bantuan SPSS statistik versi 13. Sementara, perolehan nilai 0,164 dari r_{tabel} merupakan perolehan dari Korelasi *Product Moment* dengan tingkat kesalahan 10 persen. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat empat butir instrumen yang dinyatakan tidak valid yaitu butir instrumen nomor 14, 16, 18, dan 20. Hal tersebut dapat dibuktikan karena nilai r hitung $\leq r$ tabel. Artinya, keempat butir instrumen tersebut dihilangkan dan tidak perlu diganti karena indikator instrumen dapat terukur dengan butir instrumen lainnya.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan pengujian yang digunakan untuk menjaga kehandalan dari suatu instrumen penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan uji reliabilitas instrumen agar instrumen dapat mengukur obyek yang sama dalam jangka waktu yang berbeda. Pada penelitian ini, pengukuran reliabilitas menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan bantuan SPSS versi 13. Adapun hasil dari uji reliabilitas yang dilakukan adalah nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,727. Uji reliabilitas mengacu pada Siegle yang menggunakan pedoman reliability instrumen yaitu sebesar 0.7. artinya, instrumen yang dinyatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cronbach* \geq

0,7. Sementara pada penelitian ini, nilai *Alpha Cronbach* $0,727 \geq$ dari 0,7 sehingga instrumen yang diuji dinyatakan reliabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Statistik Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.727	24

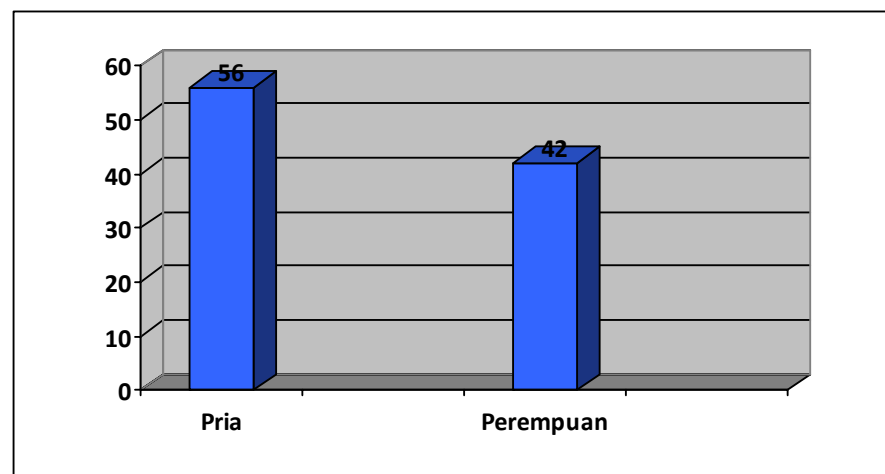
C. Deskripsi Data Penelitian

1. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Serang yang menjadi penerima program beras raskin di Kecamatan Serang. Jumlah penerima program beras raskin di Kecamatan Serang berjumlah 4.904 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini, perhitungan sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 10% (0,1). Maka diperoleh hasil sampel sebanyak 98 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random*), dengan cara setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *proportionate stratified random sampling*, dimana sampel dihitung berdasarkan ketentuan besaran sampel atas besaran populasi.

Dalam proses pengisian kuesioner, peneliti meminta responden untuk memberikan identitas diri sebagai penunjang data. Identitas diri responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pendapatan perhari, serta pekerjaan. Berdasarkan pengisian tersebut, diperoleh hasil bahwa berdasarkan jenis kelamin didapat jumlah responden pria sebanyak 56 dan responden perempuan sebanyak 42 dari jumlah anggota sampel sebanyak 98 . Hal ini dapat dilihat pada diagram berikut :

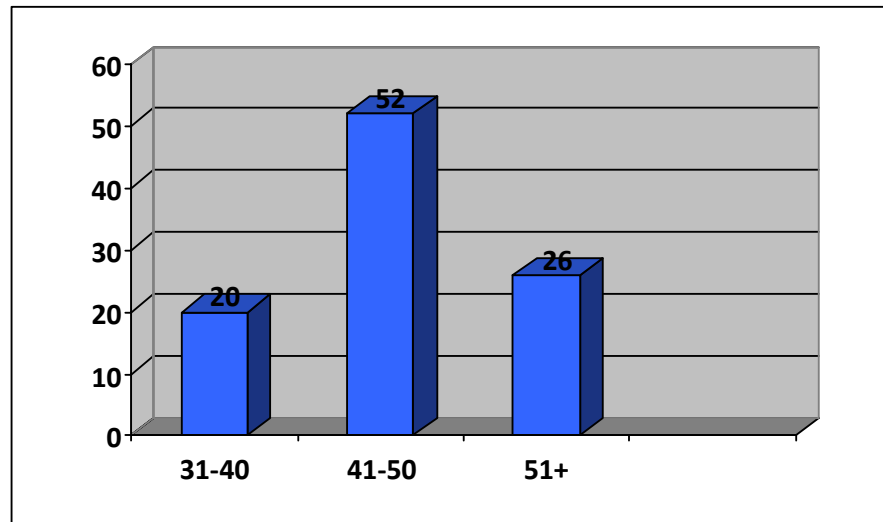
Diagram 4.1
Identitas Responden Berdasarkan
Jenis Kelamin



Sumber : (Data Primer Diolah, 2010)

Berdasarkan diagram di atas, dapat digambarkan bahwa jumlah responden pria lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan dengan selisih yang sedikit yaitu 14 responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden pria lebih banyak memberikan penilaiannya terhadap pelaksanaan program raskin di Kecamatan Serang, dibandingkan dengan responden perempuan.

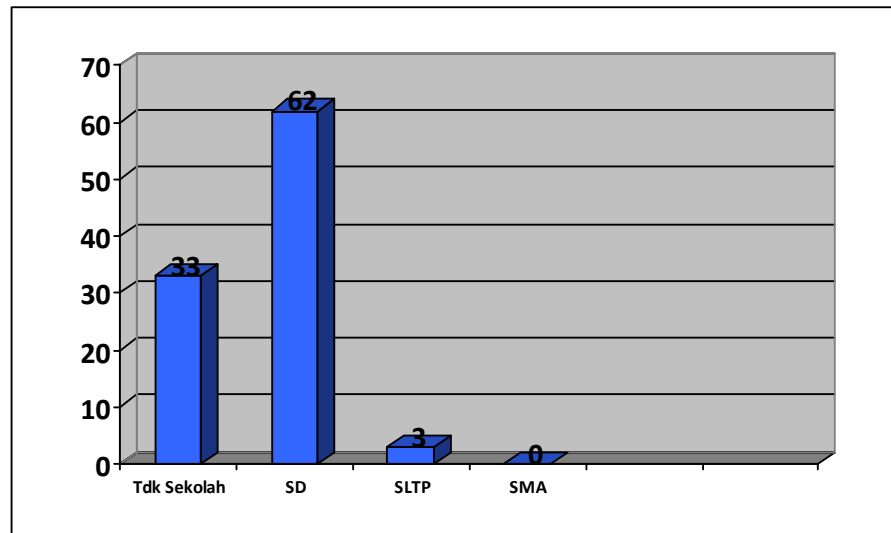
Diagram 4.2
Identitas Responden Berdasarkan
Tingkat Usia



Sumber : (Data Primer Diolah,2010)

Berdasarkan diagram 4.2 tersebut, dapat digambarkan bahwa tingkat usia responden di Kecamatan Serang didominasi oleh jumlah responden yang berusia 41-50 tahun yang berjumlah 52 responden. Responden yang berusia lebih dari 51 tahun berjumlah 26 responden, serta responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 20 responden dari keseluruhan anggota sampel. Jumlah responden yang berusia 41-50 tahun menunjukkan bahwa penerima raskin sebagian besar masih tergolong usia produktif, maka penerima raskin masih memiliki responsivitas dalam memberikan penilaiannya terhadap Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Serang.

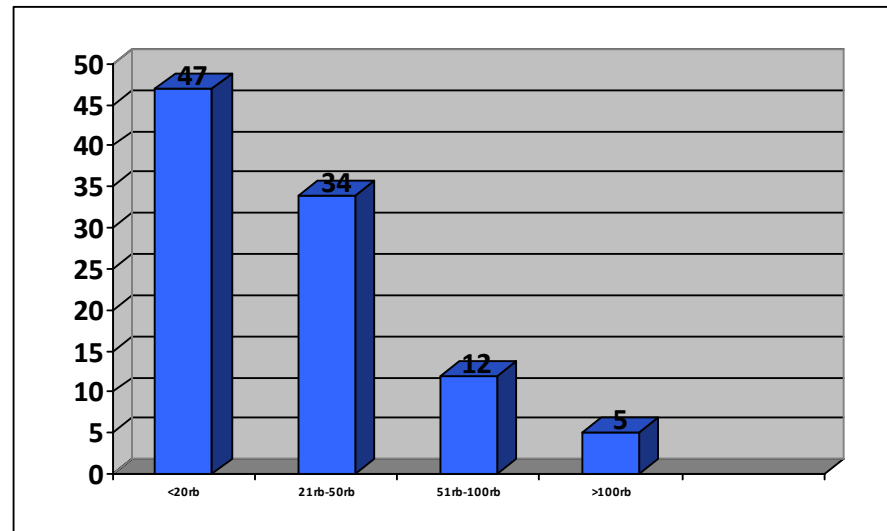
Diagram 4.3
Identitas Responden Berdasarkan
Tingkat Pendidikan



Sumber : (Data Primer Diolah, 2010)

Berdasarkan diagram 4.3 di atas, dapat digambarkan bahwa semua responden memiliki latar belakang pendidikan terakhir yang beragam. Misalnya saja, terdapat 3 responden berlatar belakang pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 62 responden yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD), serta 33 responden yang tidak bersekolah. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya kemiskinan di Kecamatan Serang adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah. Sehingga, hal ini menyebabkan mereka termasuk dalam kriteria masyarakat miskin di Kecamatan Serang.

Diagram 4.4
Identitas Responden Berdasarkan
Tingkat Pendapatan Perhari

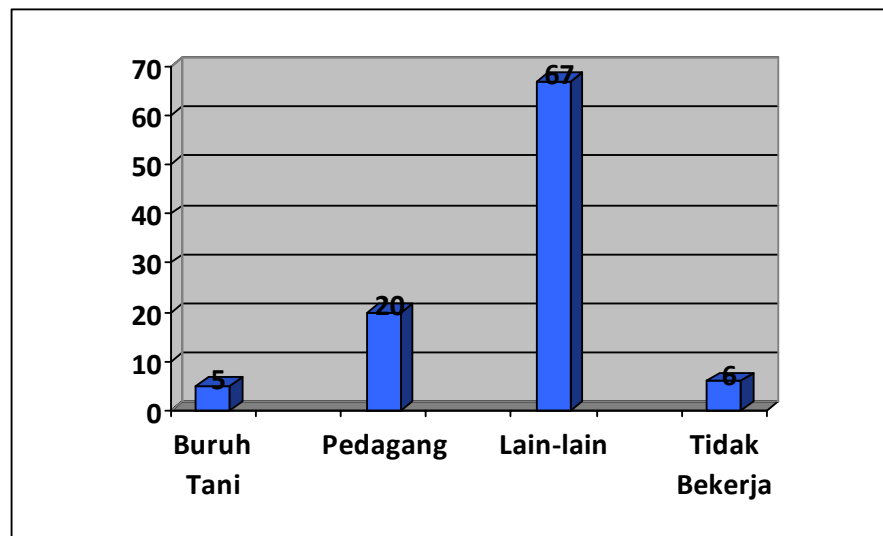


Sumber : (Data Primer Diolah, 2010)

Berdasarkan diagram 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan masyarakat miskin sebagai penerima beras raskin di Kecamatan Serang relatif berbeda. 47 responden dengan tingkat penghasilan dibawah Rp. 20.000/hari, 34 responden dengan tingkat penghasilan Rp. 21.000 – Rp. 50.000/hari, 12 responden dengan tingkat penghasilan Rp. 51.000 – Rp.100.000/hari, serta 5 responden dengan tingkat penghasilan di atas Rp. 101.000/hari. Dapat digambarkan bahwa terdapat faktor lain yang menimbulkan adanya kemiskinan di Kecamatan Serang adalah tingkat pendapatan masyarakat yang cukup rendah, sementara hal tersebut tidak diimbangi dengan kebutuhan hidup mereka yang semakin bertambah seperti misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan pokok mereka.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat jumlah responden yang berpenghasilan Rp 21 ribu-Rp 50 ribu (34 responden), Rp 51 ribu- Rp 100 ribu (12 responden), serta \geq Rp 100 ribu (5 responden). Bila disesuaikan dengan kriteria penerima raskin dengan standar BPS, maka ketiga kategori tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebesar Rp 800.000/bulan. Namun, karena adanya kebijaksanaan dari aparat setempat dalam menetapkan penerima raskin, maka penerima raskin yang masuk dalam ketiga kategori tersebut layak untuk menerima beras raskin. Hal ini sebagai bentuk kendala aparat setempat dalam menerapkan kriteria penerima raskin di lapangan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat miskin saat ini.

Diagram 4.5
Identitas Responden Berdasarkan
Jenis Pekerjaan



Sumber : (Data Primer Diolah, 2010)

Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa seluruh responden memiliki klasifikasi pekerjaan yang relatif berbeda. Adapun yang memiliki pekerjaan sebagai buruh tani sebanyak 5 responden, yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 20 responden, yang memiliki pekerjaan lain-lain sebanyak 67 responden, serta yang tidak memiliki pekerjaan sebanyak 6 responden. Spesifikasi identitas responden dengan pekerjaan lain-lain terdiri atas pekerjaan sebagai tukang becak, buruh, tukang ojek, dan tukang parkir. Pekerjaan lain-lain yang mendominasi jenis pekerjaan para responden menunjukkan bahwa, ternyata pekerjaan informal tersebut disebabkan salah satunya karena rendahnya tingkat pendidikan para responden. Sehingga mereka lebih memilih jenis pekerjaan tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

2. Analisis Data Penelitian

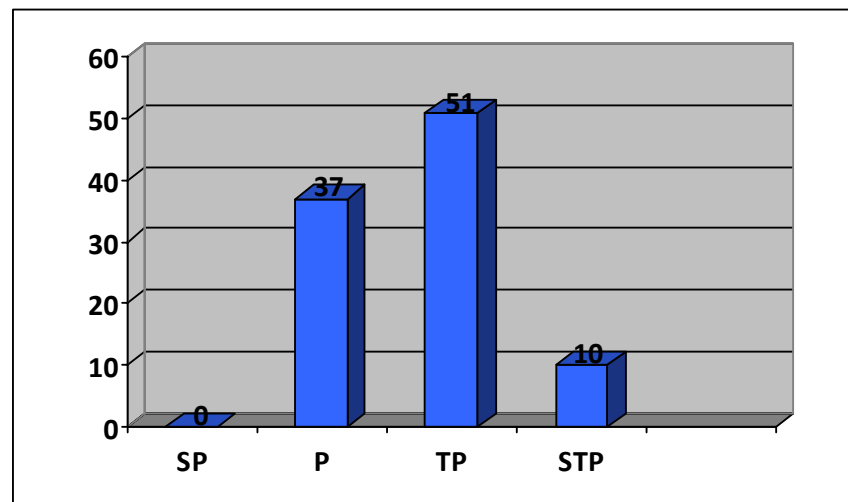
Analisis data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan peneliti dengan cara mendeskripsikan data hasil penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada seluruh penerima beras raskin di Kecamatan Serang yang menjadi anggota sampel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana penilaian responden terhadap pelaksanaan program raskin di Kecamatan Serang.

Adapun lebih detailnya, peneliti menjelaskannya dalam bentuk diagram disertai pemaparan dan kesimpulan dari hasil jawaban responden berdasarkan butir-butir pertanyaan yang telah peneliti buat sebelumnya.

Dimana, butir-butir pertanyaan tersebut dituangkan dalam bentuk kuesioner. Uraian kuesioner diuraikan oleh peneliti dalam bentuk penjelasan butir-butir pertanyaan secara sistematis. Kuesioner tersebut peneliti ajukan kepada 98 responden yang menjadi penerima beras raskin di Kecamatan Serang yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemaparan mengenai butir-butir pertanyaan ditafsirkan sesuai dengan indikator pertanyaannya, sehingga akan terlihat beberapa penafsiran dalam menguraikan jawaban responden yang berbeda tergantung dari indikator pertanyaannya. Seperti misalnya, SP (sangat puas), P (puas), TP (tidak puas), STP (sangat tidak puas). Uraian lebih lanjut mengenai hasil kuesioner dari penelitian ini, bisa dilihat pada uraian berikut ini.

Diagram 4.6
Kepuasan Penerima Raskin Terhadap Kualitas Beras Raskin



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 1)

Berdasarkan diagram 4.6 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab puas sebanyak 37 responden,

yang menjawab tidak puas sebanyak 51 responden, yang menjawab sangat tidak puas sebanyak 10 responden, serta tidak ada responden yang menjawab sangat puas dari keseluruhan sampel.

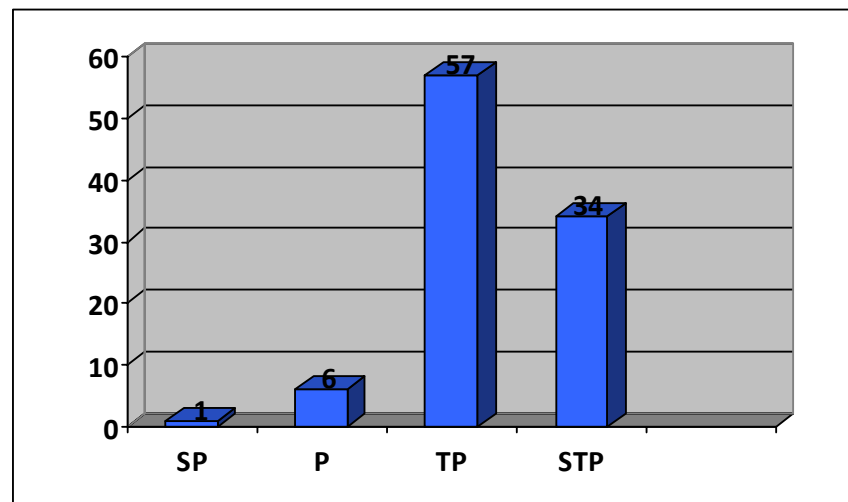
Responden yang menjawab puas sebanyak 37 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin merasa puas dengan kualitas atau kondisi beras raskin yang selama ini dikonsumsi. Mereka lebih menerima apapun kondisi berasnya, karena mereka tidak begitu menjadikan kualitas beras raskin menjadi permasalahan yang perlu ditanggapi secara serius. Hal ini disebabkan, karena mereka lebih bersikap terbuka untuk menerima apapun kondisi berasnya mengingat beras raskin sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Selain itu, kondisi beras raskin yang telah diterima lebih sering dalam kondisi cukup baik sesuai dengan keinginan mereka. Serta, mereka lebih memahami keadaan beras raskin yang diterima bila disesuaikan dengan harga beras di pasar. Harga beras raskin hanya Rp 1.600/kg, sementara harga beras di pasar mencapai Rp 6.500/kg.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak puas sebanyak 51 responden. Hal ini menggambarkan bahwa mereka tidak puas dengan kualitas beras raskin yang telah diterima. Hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa beras raskin yang telah diterima lebih sering dalam kondisi buruk dan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Disamping itu, terdapat responden yang menjawab sangat tidak puas sebanyak 10 responden. Hal ini disebabkan, karena mereka lebih bersikap responsif

terhadap beras raskin yang selama ini mereka beli. Responsivitas mereka terlihat dari bagaimana mereka tidak hanya sekedar menerima beras raskin namun, mereka juga memiliki penilaian sendiri terhadap beras tersebut. Mereka menganggap bahwa kondisi beras yang telah diterima sangat jauh dari keinginan mereka, yaitu beras yang layak konsumsi.

Ketidak puasan mereka akan kualitas beras raskin menjadi persoalan tersendiri bagi mereka, sehingga mereka lebih berharap kualitas beras raskin lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Hal ini akan mendorong timbulnya kepuasan mereka terhadap beras tersebut, sehingga mereka tidak hanya puas dari segi harga beras raskinnya saja, melainkan mereka juga puas terhadap kualitas berasnya.

Diagram 4.7
Kepuasan Penerima Raskin Terhadap Perolehan Beras Raskin



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 2)

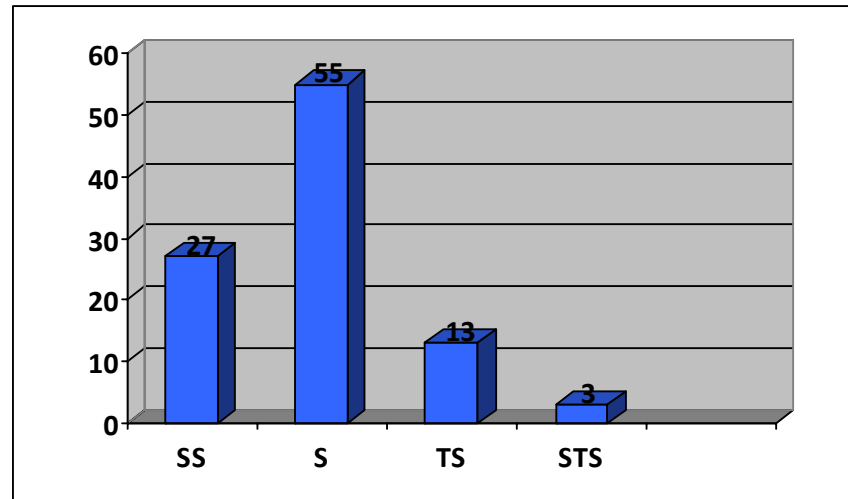
Berdasarkan diagram 4.7 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sangat puas sebanyak 1 responden, yang menjawab puas sebanyak 6 responden, yang menjawab tidak puas sebanyak 57 responden, serta yang menjawab sangat tidak puas sebanyak 34 responden dari keseluruhan sampel.

Responden yang menjawab sangat puas sebanyak 1 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin merasa sangat puas dengan perolehan beras raskin yang telah diterima. Hal ini disebabkan karena jumlah beras raskin yang telah diterima sangat mencukupi kebutuhan pokok mereka. Selain itu, responden yang menjawab puas sebanyak 6 responden menunjukkan bahwa mereka lebih bersikap terbuka untuk menerima jumlah beras yang telah mereka peroleh. Artinya, Mereka lebih menganggap berapapun jumlah berasnya, mereka akan terima secara terbuka.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak puas sebanyak 57 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak puas dengan perolehan beras raskin yang telah diterima. Hal ini disebabkan karena perolehan beras yang diterima, tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari. Sementara, terdapat responden yang menjawab sangat tidak puas sebanyak 34 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat tidak puas terhadap perolehan beras raskin yang telah diterima. Mereka menilai bahwa perolehan beras raskin yang telah diterima tidak sesuai dengan keinginan mereka, karena sangat tidak mencukupi

kebutuhan pokok keluarga. Terlebih bagi mereka yang memiliki jumlah anggota keluarga yang cukup banyak.

Diagram 4.8
Program Raskin Meringankan Beban Hidup Penerima Raskin



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 3)

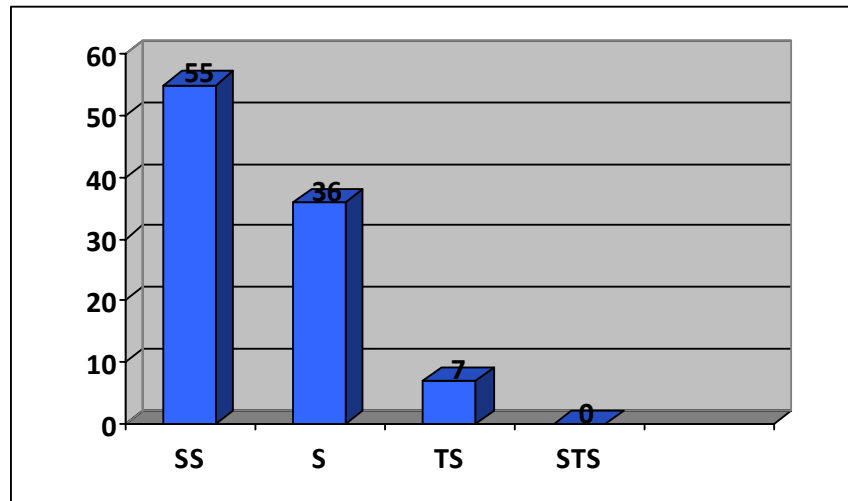
Berdasarkan diagram 4.8 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 27 responden, yang menjawab setuju sebanyak 55 responden, yang menjawab tidak setuju sebanyak 13 responden, serta yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 responden dari keseluruhan sampel.

Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 27 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin menilai bahwa dengan adanya program raskin sangat membantu mereka dalam meringankan beban hidup keluarga miskin. Dengan adanya program raskin, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari. Sementara, terdapat responden yang menjawab setuju

sebanyak 55 responden. Hal ini menggambarkan bahwa mereka menilai dengan adanya program raskin, cukup membantu mereka dalam meringankan beban hidup keluarga miskin. Program raskin cukup membantu keluarga miskin dalam menghadapi permasalahan hidup keluarganya. Terlebih beban hidup lainnya perlu juga mendapat perhatian yang serius seperti misalnya persoalan kesehatan, dan pendidikan anggota keluarga.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 13 responden. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program raskin belum memberikan dampak yang signifikan dalam membantu keluarga miskin menghadapi beban hidup keluarganya. Mereka menganggap bahwa program raskin belum mampu membantu keluarga miskin dalam mengurangi permasalahan keluarga miskin. Sementara, terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 responden. Hal ini menunjukkan bahwa, mereka menganggap dengan adanya program raskin tidak memberikan pengaruh yang besar dalam meringankan beban hidup keluarga miskin. Mereka menilai bahwa ada atau tidaknya program raskin tetap menghasilkan kondisi yang sama. Hal ini lebih disebabkan karena mereka merasa sangat tidak puas dengan jumlah dan kualitas beras raskin itu sendiri.

Diagram 4.9
Program Raskin Mengurangi Beban Pengeluaran Keluarga Miskin



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 4)

Berdasarkan diagram 4.9 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 55 responden, yang menjawab setuju sebanyak 36 responden, yang menjawab tidak setuju sebanyak 7 responden, serta tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dari keseluruhan sampel.

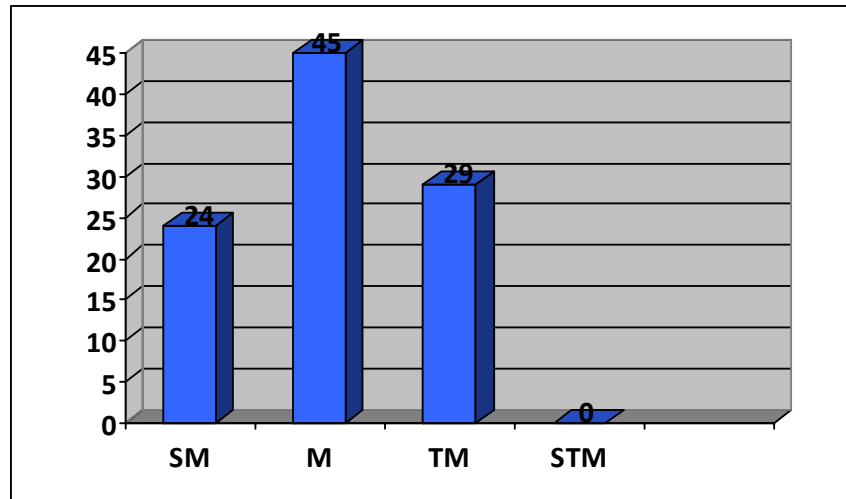
Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 55 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin menilai bahwa dengan adanya program raskin sangat membantu mereka dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangganya. Hal ini disebabkan karena harga beras raskin yang sangat terjangkau dengan daya beli mereka, sehingga pengeluaran mereka akan kebutuhan pokok bisa ditekan. Dengan adanya program raskin, pengeluaran keluarga miskin yang tergolong rendah dapat difokuskan secara

merata kepada persoalan-persoalan kebutuhan hidup lainnya, seperti persoalan kesehatan, dan pendidikan anggota keluarga.

Sementara, terdapat responden yang menjawab setuju sebanyak 36 responden. Hal ini menggambarkan bahwa dengan adanya program raskin, cukup membantu keluarga miskin dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangganya. Mereka menganggap bahwa program raskin cukup berperan besar dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, disamping harga beras raskin yang cukup sesuai dengan penghasilan rumah tangga miskin. Terlebih bila dibandingkan antara harga beras raskin dengan harga beras lainnya di pasar, maka harga beras raskin dengan harga Rp 1.600/kg jauh lebih murah dan terjangkau oleh penghasilan mereka daripada harga beras lainnya di pasar yang berharga Rp 4.500/kg.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 7 responden. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program raskin belum mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dikarenakan beberapa persoalan. Misalnya saja, penghasilan rumah tangga miskin yang belum mampu menjangkau harga beras raskin, karena penghasilan rumah tangga miskin masih tergolong rendah. Terlebih beberapa persoalan lain yang juga membutuhkan uang yang jumlahnya tidak sedikit.

Diagram 4.10
Kemampuan Penerima Raskin Terhadap Harga Beras Raskin



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 5)

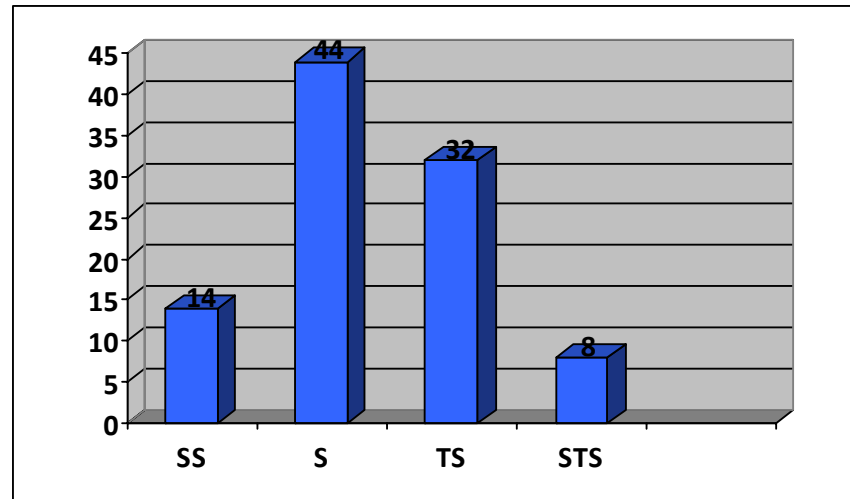
Berdasarkan diagram 4.10 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sangat mampu (SM) sebanyak 24 responden, yang menjawab mampu (M) sebanyak 45 responden, yang menjawab tidak mampu (TM) sebanyak 29 responden, serta tidak ada responden yang menjawab sangat tidak mampu (STM) dari keseluruhan sampel.

Responden yang menjawab sangat mampu sebanyak 24 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin tidak memiliki kemampuan untuk membeli beras raskin setiap bulannya. Mereka merasa sangat mampu untuk membeli beras raskin setiap bulannya, sehingga hal ini tidak menjadi persoalan bagi mereka untuk tetap membeli beras raskin. Mereka menganggap bahwa harga beras raskin masih sangat terjangkau dengan penghasilan mereka setiap bulannya. Sementara, terdapat responden yang

menjawab mampu sebanyak 45 responden. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli mereka terhadap harga beras raskin masih terbilang cukup mampu. Bila dibandingkan antara harga beras raskin dengan harga beras pada umumnya, maka mereka lebih memilih membeli beras raskin karena harga beras raskin yang cukup terjangkau dengan penghasilan mereka. Oleh sebab itu, mereka merasa cukup mampu membeli beras raskin setiap bulannya.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak mampu sebanyak 29 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli beras raskin setiap bulannya. Hal ini lebih disebabkan karena daya beli mereka terhadap harga beras raskin relatif rendah. Ketidakmampuan mereka akan harga beras raskin lebih disebabkan karena masih terdapat kebutuhan lain yang perlu mendapat perhatian serius. Misalnya, kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan anggota keluarga. Sementara, penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhannya.

Diagram 4.11
Kesesuaian Harga Beras Raskin Terhadap Kualitas Berasnya



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 6)

Berdasarkan diagram 4.11 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sangat sesuai (SS) sebanyak 14 responden, yang menjawab sesuai (S) sebanyak 44 responden, yang menjawab tidak sesuai (TS) sebanyak 32 responden, serta yang menjawab sangat tidak sesuai (STS) sebanyak 8 responden dari keseluruhan sampel.

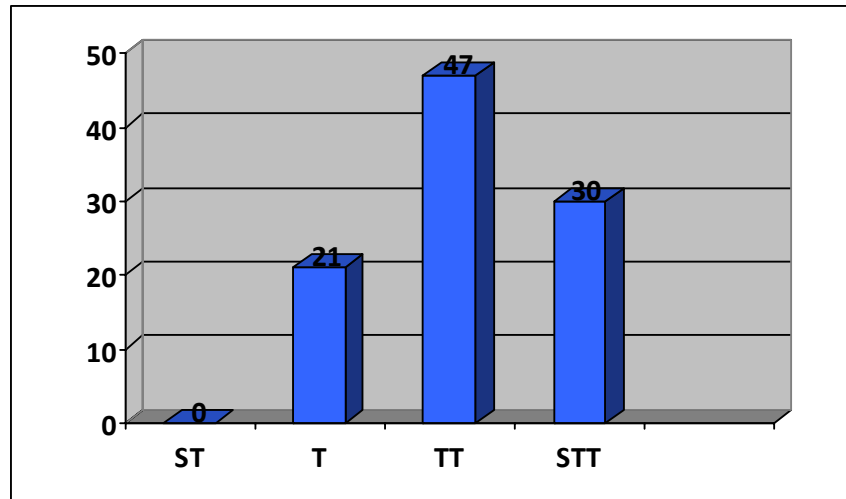
Responden yang menjawab sangat sesuai sebanyak 14 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin menilai bahwa harga beras raskin sangat sesuai dengan kualitas beras raskin itu sendiri. Mereka menganggap bahwa kualitas beras yang diterima sudah sangat sesuai dengan harganya. Karena bila dibandingkan dengan kondisi beras pada umumnya, tentu harga berasnya akan jauh lebih mahal dari harga beras raskin. Sementara terdapat responden yang menjawab sesuai sebanyak 44 responden. Hal ini menunjukkan bahwa harga beras raskin cukup sesuai

dengan kualitas beras raskin. Perbandingan keduanya cukup memberikan kepuasan tersendiri bagi mereka, karena mereka cukup puas dengan harga beras raskin yang terjangkau dengan penghasilan mereka setiap bulannya. Walaupun terkadang kualitas beras raskin tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sesuai sebanyak 32 responden. Hal ini menunjukkan bahwa harga beras raskin tidak sesuai dengan kualitas berasnya. Mereka lebih melihat hal tersebut dari sisi kualitas beras raskin yang masih jauh dari harapan mereka, sehingga berapa pun biaya yang dikeluarkan untuk membeli beras raskin tidak lah sebanding dengan kualitas berasnya. Sementara terdapat responden yang menjawab sangat tidak sesuai sebanyak 8 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menganggap ketidaksesuaian harga beras raskin dengan kualitas berasnya, lebih disebabkan karena ketidakpuasan mereka terhadap kualitas beras yang terkadang dalam kondisi buruk. Mereka lebih menginginkan kualitas beras raskin yang baik dengan harga beras yang relatif terjangkau dengan penghasilan mereka.

Harapan mereka sebagai bentuk penilaian terhadap kesesuaian harga beras dengan kualitasnya menunjukkan bahwa terdapat input berupa masukan yang perlu mendapat perhatian bagi Bulog selaku badan yang menangani penyaluran beras untuk meningkatkan kualitas beras raskin.

Diagram 4.12
Ketepatan Waktu Proses Penyaluran Beras Raskin



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 7)

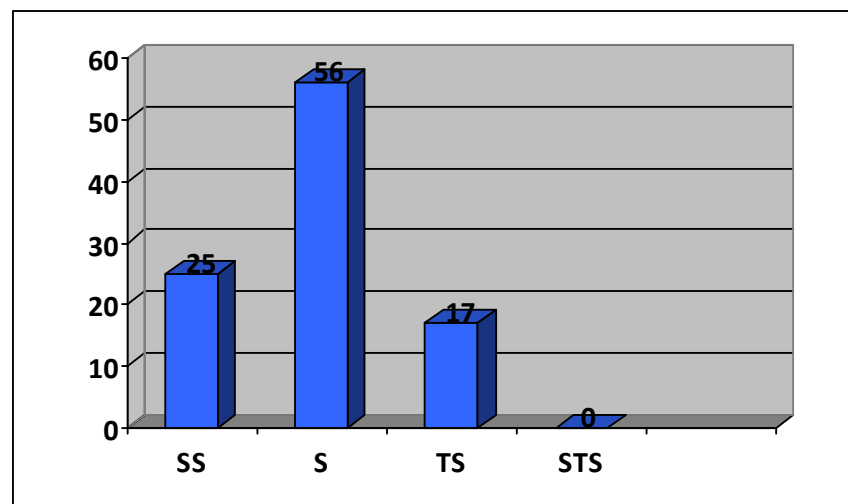
Berdasarkan diagram 4.12 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab tepat (T) sebanyak 21 responden, yang menjawab tidak tepat (TT) sebanyak 47 responden, yang menjawab sangat tidak tepat (STT) sebanyak 30 responden, serta tidak ada yang menjawab sangat tepat (ST) dari keseluruhan sampel.

Responden yang menjawab tepat sebanyak 21 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin menilai bahwa proses penyaluran beras raskin sudah sangat tepat waktu. Hal ini disebabkan karena mereka menilai proses penyaluran beras raskin selalu berjalan setiap bulannya sesuai dengan keinginan mereka. Proses pengiriman beras pun terkadang diterima pada awal bulan, sehingga mereka merasa puas dengan hal tersebut.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak tepat sebanyak 47 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan

proses pengiriman beras raskin yang dilakukan tepat waktu. Itu disebabkan karena mereka menilai proses pengiriman beras tidaklah berjalan secara teratur. Misalnya saja terkadang proses penyaluran beras dilakukan pada pertengahan atau akhir bulan, sehingga mereka merasa tidak puas dengan proses penyaluran beras raskin selama ini. Sementara terdapat responden yang menjawab sangat tidak tepat sebanyak 30 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa tidak puas dengan proses penyaluran beras raskin selama ini yang terkadang tidak jelas waktu penyalurannya. Misalnya saja terkadang proses penyaluran beras dilakukan selama dua kali dalam 1 bulan sebagai ganti dari bulan sebelumnya yang tidak disalurkan.

Diagram 4.13
Proses Penyaluran Beras Raskin Tanpa Adanya Pungutan Lain



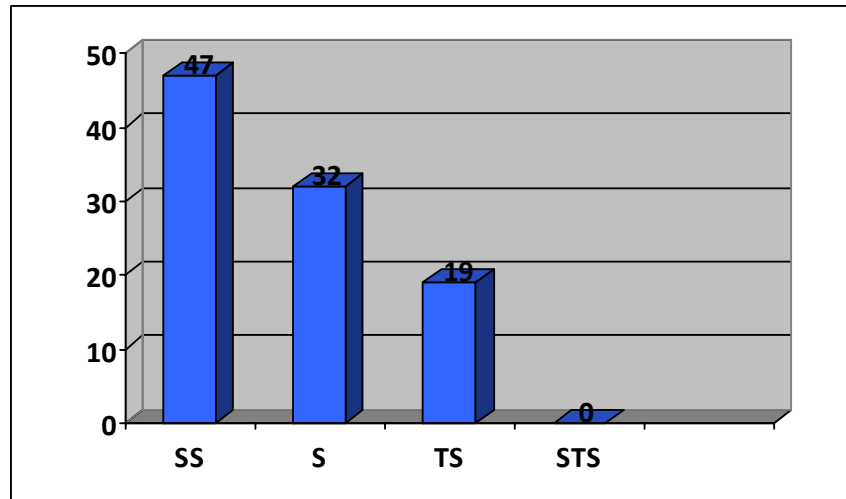
Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 8)

Berdasarkan diagram 4.13 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 25 responden, yang menjawab setuju sebanyak 56 responden, yang menjawab tidak setuju sebanyak 17 responden, serta tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju dari keseluruhan sampel.

Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 25 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin menilai bahwa tidak ada pungutan lain yang dikenakan kepada mereka dalam membeli beras raskin setiap bulannya. Mereka hanya dikenakan biaya yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat dalam membeli beras. Sementara, responden yang menjawab setuju sebanyak 56 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka pun tidak dikenakan biaya lain sedikitpun di dalam membeli beras raskin setiap bulannya, sehingga mereka merasa cukup mampu untuk membeli beras raskin sesuai dengan kemampuan mereka.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 17 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dikenakan biaya lain di dalam membeli beras raskin setiap bulannya. Misalnya saja, terdapat biaya kematian sebesar Rp 4.000 yang dikenakan kepada mereka untuk setiap pembelian beras raskin. Biaya kematian dipakai bilamana terdapat penerima raskin yang meninggal dunia, maka biaya tersebut disumbangkan kepada yang bersangkutan dalam bentuk sumbangan. Tentu hal tersebut bila dikenakan kepada keluarga miskin yang memiliki penghasilan yang tergolong rendah, akan menjadi beban tersendiri bagi mereka.

Diagram 4.14
Penerima Raskin Sangat Mengandalkan Beras Raskin



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 9)

Berdasarkan diagram 4.14 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 47 responden, yang menjawab setuju sebanyak 32 responden, yang menjawab tidak setuju sebanyak 19 responden, serta tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju dari keseluruhan sampel.

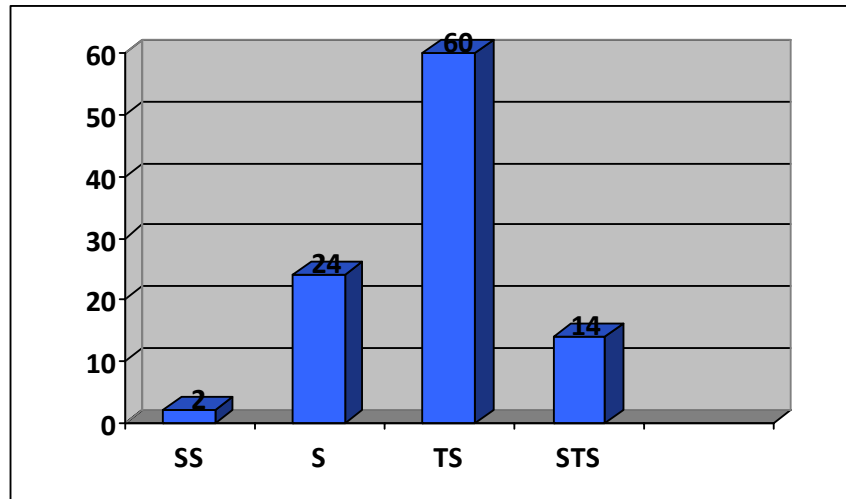
Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 47 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin sangat mengandalkan beras raskin di dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Hal ini disebabkan karena tingkat penghasilan mereka yang tergolong rendah (lihat tabel 4.4. hal 63), sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli beras pada umumnya dan lebih memilih membeli beras raskin setiap bulannya.

Persoalan pendapatan yang rendah merupakan persoalan utama yang menyebabkan mereka membeli beras raskin. Terlebih bila dibandingkan antara harga beras raskin dengan harga beras biasanya, harga beras raskin jauh lebih murah dan terjangkau bila dibandingkan dengan harga beras pada umumnya. Bila diperbandingkan harga beras raskin hanya Rp 1.600/kg, sementara harga beras di pasar mencapai Rp 6.500/kg. Dari perbedaan harga tersebut, jelas terlihat mereka lebih memilih membeli beras raskin.

Sementara, responden yang menjawab setuju sebanyak 32 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih mengandalkan beras raskin hanya pada saat beras raskin telah diterima, namun ketika beras raskin belum diterima, maka mereka tidak memaksakan diri untuk tetap menunggu beras tersebut, melainkan lebih memilih untuk membeli beras lainnya walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 19 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengandalkan beras raskin di dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini disebabkan karena mereka lebih melihat hal itu dari sisi perolehan beras yang telah diterima selama ini. Mereka merasa perolehan beras raskin masih jauh dari keinginan mereka. Perolehan beras yang mereka terima tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok keluarganya sehingga mereka hanya menjadikan beras raskin sebagai beras alternatif saja yang bilamana telah disalurkan, maka mereka akan membelinya.

Diagram 4.15
Program Raskin Dapat Memenuhi Kebutuhan Pokok



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 10)

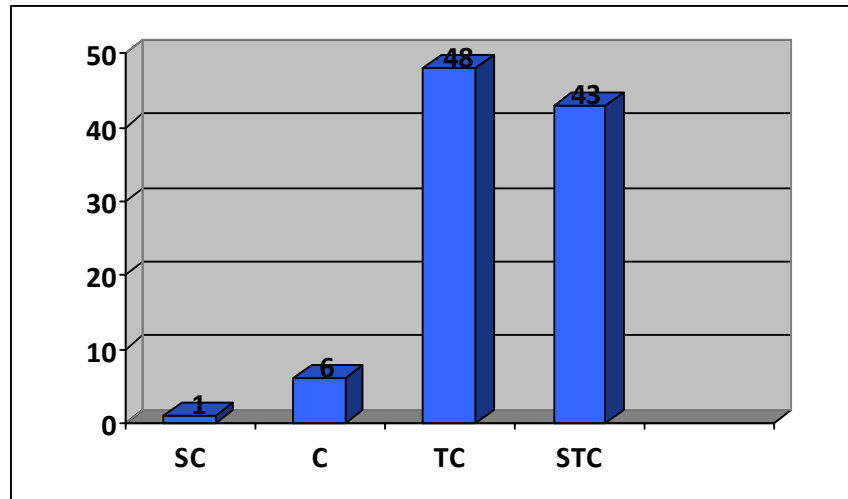
Berdasarkan diagram 4.15 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 responden, yang menjawab setuju sebanyak 24 responden, yang menjawab tidak setuju sebanyak 60 responden, serta yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 14 responden dari keseluruhan sampel.

Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 responden memberikan gambaran bahwa, mereka menilai program raskin dapat memenuhi kebutuhannya. Hal ini disebabkan karena secara tidak langsung, program raskin sangat memberikan pengaruh yang cukup besar di dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Misalnya saja, dengan adanya beras raskin, kebutuhan pokok rumah tangga miskin dapat terbantu setiap bulannya karena dilihat dari sisi harga beras raskin sendiri, dapat terjangkau oleh penghasilan mereka. Sementara, responden yang menjawab setuju

sebanyak 24 responden. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit banyaknya program raskin cukup berperan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin. Peranan program raskin lebih terasa pada adanya perbedaan yang signifikan bila dilihat dari sudut pandang harga beras yang murah dan terjangkau oleh mereka, disamping program raskin cukup memberikan keringanan kepada mereka dalam menekan pengeluaran rumah tangga yang relatif cukup banyak.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 60 responden. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan program raskin belum dirasakan secara signifikan manfaatnya kepada mereka, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa program raskin hanya memberikan manfaat yang terbatas kepada mereka. Misalnya saja, beras raskin yang diperoleh pada umumnya tidak selalu cukup untuk dikonsumsi oleh mereka selama 1 bulan lamanya, melainkan hanya cukup untuk 2-3 hari. Sementara responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 14 responden. Hal ini disebabkan karena mereka menilai bahwa program raskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka setiap bulannya. Misalnya saja, mereka tidak puas dengan jumlah beras raskin yang telah mereka terima dan untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka, mereka hanya menambahkannya dengan membeli beras biasa dengan harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga beras raskin.

Diagram 4.16
Kecukupan Penerima Raskin Terhadap Jumlah Berasnya



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 11)

Berdasarkan diagram 4.16 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sangat cukup (SC) sebanyak 1 responden, yang menjawab cukup (C) sebanyak 6 responden, yang menjawab tidak cukup (TC) sebanyak 48 responden, serta yang menjawab sangat tidak cukup (STC) sebanyak 43 responden dari keseluruhan sampel.

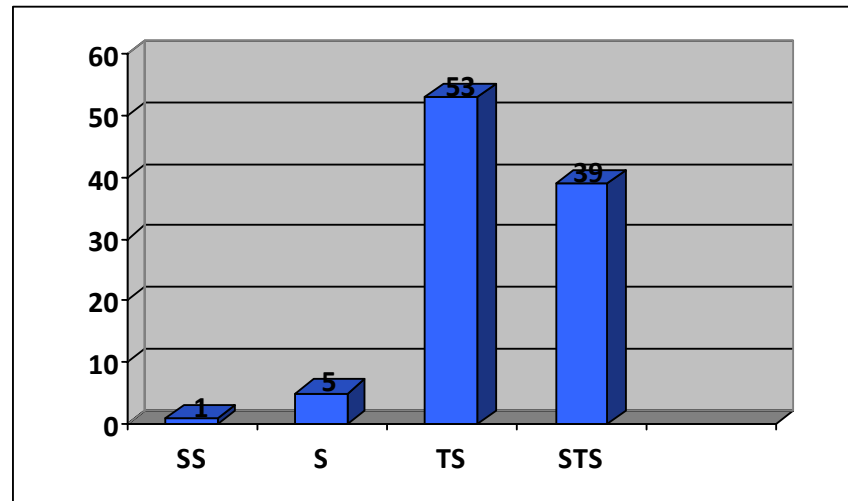
Responden yang menjawab sangat cukup sebanyak 1 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin merasa sangat cukup dengan jumlah beras raskin yang telah diperoleh. Hal ini disebabkan karena jumlah anggota keluarga yang sedikit, sehingga konsumsi akan beras raskin relatif sangat mencukupi setiap bulannya. Sementara, responden yang menjawab cukup sebanyak 6 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa tercukupi kebutuhan pokoknya dengan jumlah beras yang telah mereka terima. Hal ini disebabkan karena disamping dari jumlah anggota keluarga

yang sedikit, mereka juga lebih bersikap terbuka untuk menerima berapa pun jumlah berasnya.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak cukup sebanyak 48 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa tidak cukup dengan jumlah beras raskin yang mereka terima. Hal ini disebabkan karena jumlah anggota keluarga yang relatif cukup banyak, sehingga membutuhkan jumlah beras yang banyak pula setiap bulannya. Sementara, bila mengandalkan beras raskin, tentu tidak lah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, walaupun keberadaan program raskin cukup membantu meringankan beban hidup mereka.

Responden yang menjawab sangat tidak cukup sebanyak 43 responden. Hal ini disebabkan karena disamping dari jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan jumlah beras raskin yang diterima, mereka menganggap bahwa jumlah beras raskin hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka selama 2-3 hari. Jumlah beras yang mereka terima pada umumnya tidak mampu untuk mencukupi satu bulan lamanya. Berdasarkan data yang diperoleh pun, menunjukkan bahwa rata-rata sebagian besar penerima raskin mengkonsumsi beras setiap harinya minimal 2 liter perhari. Sehingga setiap bulannya mereka membutuhkan 60 liter beras untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.

Diagram 4.17
Kesesuaian Jumlah Beras Raskin Terhadap Kebutuhan Beras
Penerima Raskin



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 12)

Berdasarkan diagram 4.17 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sangat sesuai (SS) sebanyak 1 responden, yang menjawab sesuai (S) sebanyak 5 responden, yang menjawab tidak sesuai (TS) sebanyak 53 responden, serta yang menjawab sangat tidak sesuai (STS) sebanyak 39 responden dari keseluruhan sampel.

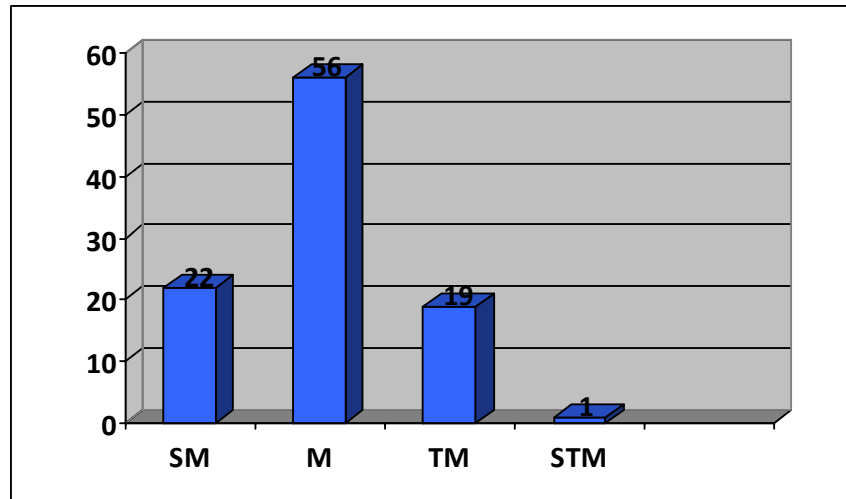
Responden yang menjawab sangat sesuai sebanyak 1 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin merasa jumlah beras raskin yang diterima sangat sesuai dengan jumlah kebutuhan konsumsi beras mereka. Hal ini disebabkan karena kebutuhan konsumsi beras tidak begitu banyak, sehingga sebanding dengan jumlah beras raskin yang diterima. Sementara, responden yang menjawab sesuai sebanyak 5 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa jumlah beras raskin cukup sesuai dengan jumlah kebutuhan konsumsi beras mereka. Hal ini disebabkan

karena mereka tidak begitu mempersoalkan jumlah beras raskin yang diterima, dan tidak terlalu mengandalkan beras raskin dalam memenuhi kebutuhan beras mereka. Sehingga, jumlah beras raskin yang mereka terima terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sesuai sebanyak 53 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa jumlah beras raskin tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan konsumsi beras mereka. Hal ini disebabkan karena jumlah anggota keluarga yang relatif banyak, sehingga tidak sebanding dengan jumlah beras raskin yang diterima. Selain itu, jumlah beras raskin yang diterima tidak lah terlalu banyak jumlahnya, sehingga hanya mampu mencukupi kebutuhan keluarga selama 1-2 hari saja. Sementara, Responden yang menjawab sangat tidak sesuai sebanyak 39 responden. Hal ini disebabkan karena responden beranggapan bahwa jumlah beras raskin sangat jauh mencukupi kebutuhan keluarga miskin selama satu bulan. Perolehan beras raskin yang biasa diterima hanya sebanyak 2 -7 liter beras saja. Perolehan tersebut kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulannya.

Ketidak sesuai antara jumlah beras raskin terhadap kebutuhan konsumsi beras keluarga miskin setiap bulannya merupakan persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut oleh pemerintah karena sebagian besar penerima raskin sangat mengandalkan beras raskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (lihat diagram 4.14. hal 80).

Diagram 4.18
Adanya Perataan Dalam Pembagian Jatah Beras Raskin



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 13)

Berdasarkan diagram 4.18 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sangat merata sebanyak 22 responden, yang menjawab merata sebanyak 56 responden, yang menjawab tidak merata sebanyak 19 responden, serta yang menjawab sangat tidak merata sebanyak 1 responden dari keseluruhan sampel.

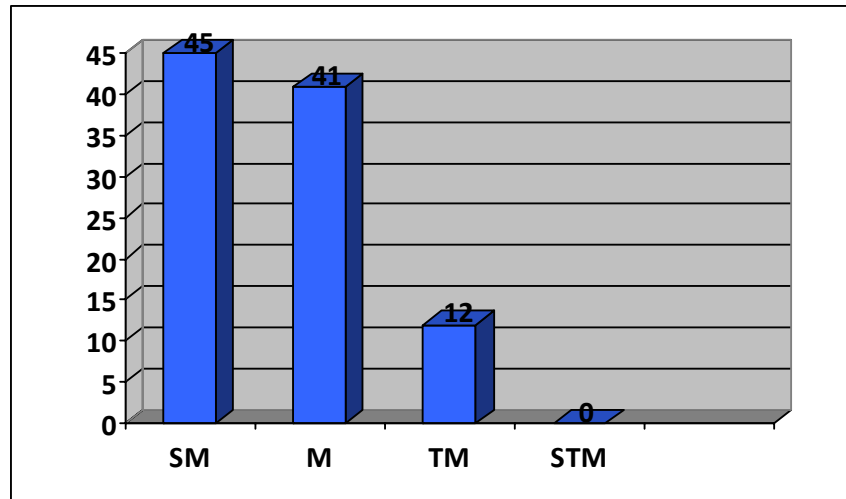
Responden yang menjawab sangat merata sebanyak 22 responden memberikan gambaran bahwa, pembagian jatah beras raskin dilakukan secara merata hanya kepada keluarga miskin. Hal ini disebabkan karena di dalam menentukan keluarga yang berhak untuk menerima beras raskin, dilakukan secara terbuka kepada warga masyarakat. Selain itu, warga masyarakat benar-benar memahami bahwa yang berhak menerima beras raskin hanya lah keluarga miskin saja. Sementara, responden yang menjawab merata sebanyak 56 responden. Tidak jauh berbeda dengan yang

lain, Hal ini disebabkan karena warga masyarakat memahami bahwa yang menjadi sasaran dari program raskin adalah rumah tangga miskin, sehingga masyarakat lain yang tidak termasuk dalam kriteria program tidak memiliki keinginan untuk membeli beras raskin.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak merata sebanyak 19 responden. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian jatah beras raskin tidak dilakukan secara merata hanya kepada rumah tangga miskin. Hal ini disebabkan karena masih tingginya tingkat kecemburuan sosial masyarakat yang juga ingin membeli beras raskin dengan harga murah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk untuk menghindari konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sementara, Responden yang menjawab sangat tidak merata sebanyak 1 responden. Hal ini disebabkan karena responden beranggapan bahwa pembagian jatah beras raskin tidak dilakukan secara merata hanya kepada keluarga miskin. Pembagian jatah beras raskin lebih dilakukan kepada masyarakat yang memiliki keinginan untuk membeli beras raskin. Hal ini tidak terlepas untuk menghindari kecemburuan sosial masyarakat, karena terkadang warga miskin pun tidak secara rutin membeli beras raskin tergantung dari jumlah penghasilan yang didapat.

Adanya ketidakmerataan dalam proses pembagian jatah beras raskin tidak terlepas dari masih adanya masyarakat miskin yang tidak terserap seutuhnya menjadi penerima raskin (lihat tabel 4.3.hal 52), sehingga terkadang warga miskin lainnya pun turut membeli beras tersebut walaupun tidak menjadi penerima raskin.

Diagram 4.19
Adanya Perataan Dalam Penyampaian Informasi Program raskin



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 15)

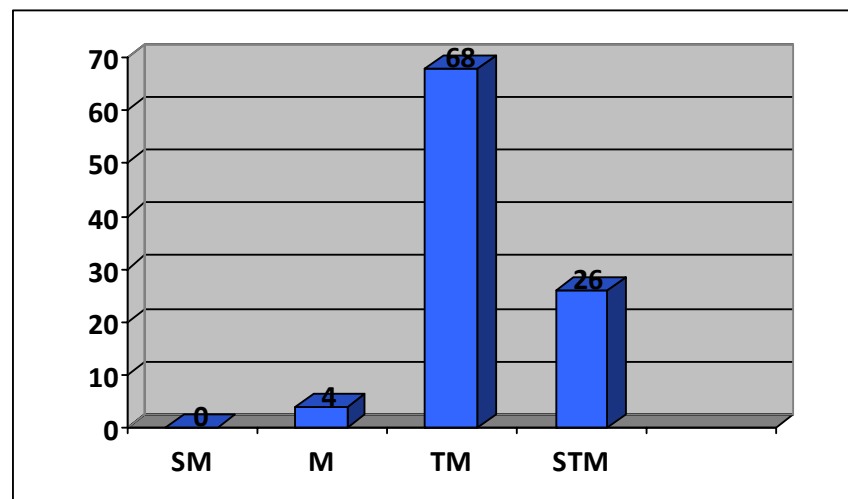
Berdasarkan diagram 4.19 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sangat merata (SM) sebanyak 45 responden, yang menjawab merata (M) sebanyak 41 responden, yang menjawab tidak merata (TM) sebanyak 12 responden, serta tidak ada yang menjawab sangat tidak merata (STM) dari keseluruhan sampel.

Responden yang menjawab sangat merata sebanyak 45 responden memberikan gambaran bahwa, penyampaian informasi program raskin sangat dilakukan secara merata kepada penerima raskin. Aparat setempat benar-benar menyampaikan segala informasi yang berkenaan dengan program raskin secara tepat kepada mereka, sehingga mereka merasa puas dengan informasi yang telah disampaikan tersebut. Sementara, responden yang menjawab merata sebanyak 41 responden. Tidak jauh berbeda dengan yang lain, salah satu kepuasan penerima raskin terhadap program raskin

adalah bagaimana informasi program dilakukan secara merata kepada mereka walaupun dengan cara yang berbeda. Misalnya saja warga dikumpulkan di rumah RT setempat dengan informasi yang disampaikan melalui pengeras suara masjid.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak merata sebanyak 12 responden. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata terdapat penerima raskin yang menganggap penyampaian informasi program tidak disampaikan secara merata kepada mereka. Hal ini lebih disebabkan karena aparat setempat di dalam menyampaikan informasi program tidak dilakukan secara merata kepada mereka, karena kesibukan lain yang dimiliki oleh aparat setempat.

Diagram 4.20
Pengetahuan Penerima Raskin Terhadap Pengurangan
Jumlah Penerimaanya



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 17)

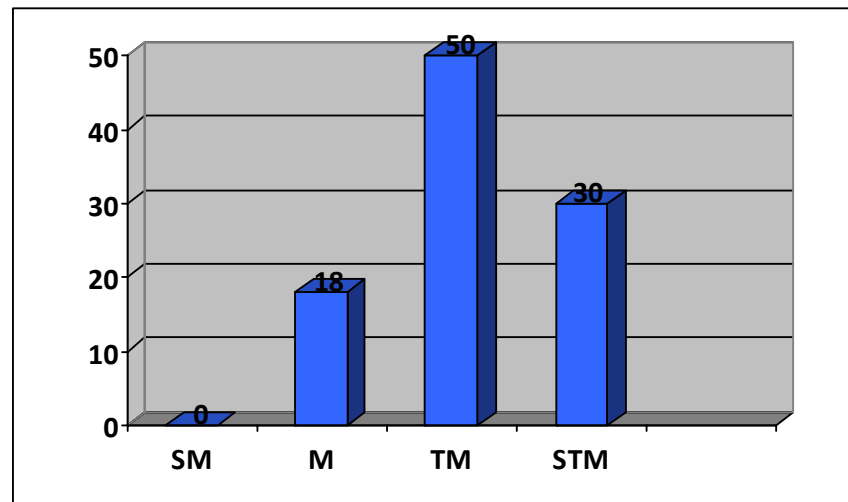
Berdasarkan diagram 4.20 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab mengetahui (M) sebanyak 4 responden, yang menjawab tidak mengetahui (TM) sebanyak 68 responden, yang menjawab sangat tidak mengetahui (STM) sebanyak 26 responden, serta tidak ada yang menjawab sangat mengetahui (SM dari keseluruhan sampel.

Responden yang menjawab mengetahui sebanyak 4 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin mengetahui adanya pengurangan penerima jatah beras raskin. Hal ini disebabkan karena informasi yang disampaikan oleh aparat setempat dilakukan secara tepat kepada mereka, sehingga mereka memahami mengenai persoalan tersebut. Walaupun informasi yang disampaikan cukup sulit untuk dipahami oleh mereka.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 68 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui informasi adanya pengurangan penerima jatah beras raskin, sehingga mereka tidak begitu mempersoalkan hal tersebut. Walaupun terkadang mereka sering mempertanyakan mengapa itu bisa terjadi. Salah satu alasan mengapa terjadi demikian adalah karena aparat setempat tidak menyampaikan informasi tersebut kepada mereka. Sementara responden yang menjawab sangat tidak mengetahui sebanyak 26 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat tidak mengetahui informasi yang

berkenaan dengan pengurangan penerima jatah beras, karena aparat setempat tidak menyampaikan informasi tersebut kepada mereka.

Diagram 4.21
Pengetahuan Penerima Raskin Terhadap Kriterianya



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 19)

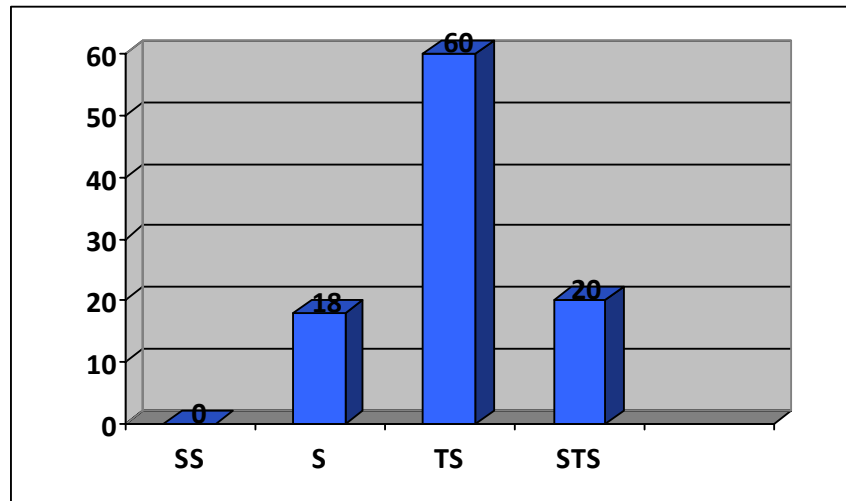
Berdasarkan diagram 4.21 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab mengetahui sebanyak 18 responden, yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 50 responden, yang menjawab sangat tidak mengetahui sebanyak 30 responden, serta tidak ada yang menjawab sangat mengetahui dari keseluruhan sampel.

Responden yang menjawab mengetahui sebanyak 18 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin cukup mengetahui adanya kriteria penerima raskin dari pemerintah setempat. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparat setempat dilakukan secara merata di dalam menentukan siapa saja yang berhak untuk

membeli beras raskin. Walaupun mereka tidak mengetahui secara detail dan lengkap apa saja yang termasuk ke dalam kriteria penerima raskin, namun mereka cukup mengetahui kriteria tersebut secara umum. Misalnya saja, mereka mengetahui bahwa beberapa kriteria penerima raskin diantaranya, berpenghasilan yang tergolong rendah yaitu sebesar Rp 600.000 per bulan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya lulus SD, serta tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 50 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kriteria penerima raskin dari pemerintah setempat. Hal ini lebih disebabkan karena tidak ada informasi lebih lanjut yang disampaikan aparat setempat mengenai hal itu, sehingga mereka tidak mengetahui adanya kriteria penerima raskin. Sementara responden yang menjawab sangat tidak mengetahui sebanyak 30 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat tidak mengetahui informasi yang berkenaan dengan kriteria penerima raskin. Hal ini disebabkan karena aparat setempat tidak menyampaikan informasi mengenai kriteria penerima raskin. Salah satu alasan mengapa aparat setempat tidak melakukan hal itu, karena mereka merasa cukup sulit menyampaikannya mengingat pemahaman penerima raskin tergolong rendah karena faktor pendidikan (lihat diagram 4.3. hal 62).

Diagram 4.22
Sasaran Program Raskin Adalah Masyarakat Miskin Yang Sesuai
Kriteria Program



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 21)

Berdasarkan diagram 4.22 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab setuju sebanyak 18 responden, yang menjawab tidak setuju sebanyak 60 responden, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 20 responden, serta tidak ada yang menjawab sangat setuju dari keseluruhan sampel.

Responden yang menjawab setuju sebanyak 18 responden memberikan gambaran bahwa, mereka menganggap program raskin sangat ditujukan kepada masyarakat miskin yang telah sesuai dengan kriteria program. Pemahaman mereka akan kriteria program secara umum membuat mereka menjawab demikian. Mereka menilai bahwa program raskin memang ditujukan kepada keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan

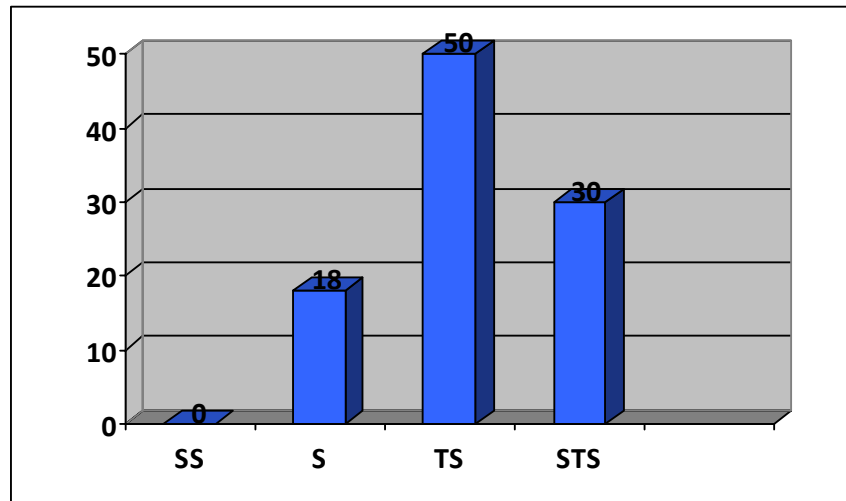
pokoknya sesuai dengan kriteria program raskin, tanpa adanya keluarga lain yang terbilang mampu dalam membeli beras raskin.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 60 responden. Hal ini menunjukkan bahwa program raskin tidak ditujukan kepada masyarakat miskin yang telah sesuai dengan kriteria program. Hal ini disebabkan karena pemahaman penerima raskin yang tergolong rendah terhadap kriteria penerima raskin mendorong mereka menjawab demikian. Namun, berdasarkan pengetahuan mereka, masih ditemukannya orang yang membeli beras raskin dari keluarga yang terbilang cukup mampu, sehingga program raskin tidak ditujukan seutuhnya hanya kepada penerima raskin.

Sementara, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 20 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menilai program raskin sangat tidak ditujukan kepada masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria program. Hal ini terjadi karena aparat setempat lebih memberikan beras raskin kepada siapa saja yang ingin membelinya, sehingga tidak hanya masyarakat miskin yang mengandalkan beras raskin saja yang membelinya. Melainkan, keluarga yang cukup mampu atau keluarga miskin yang tidak menjadi penerima raskin juga terkadang membeli beras tersebut.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat dilihat bahwa kriteria program belum berjalan sebagaimana mestinya, karena di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria turut membeli beras raskin.

Diagram 4.23
Kesesuaian Kriteria Dengan Harapan
Penerima Raskin



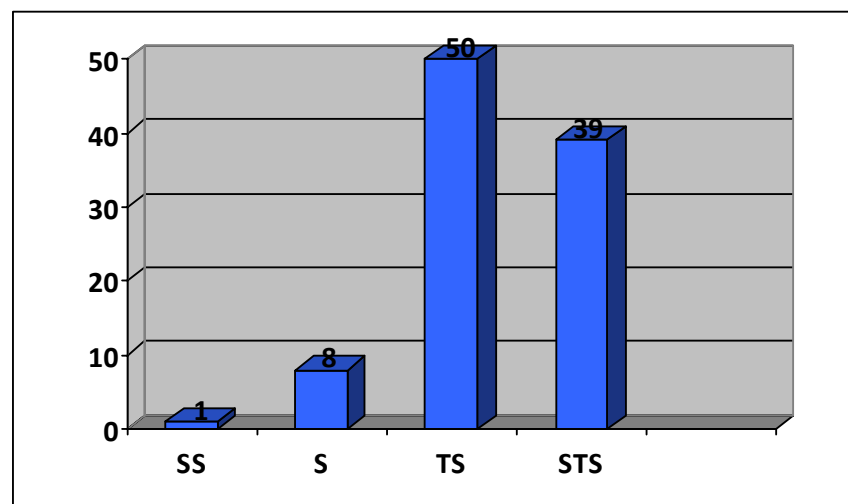
Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 22)

Berdasarkan diagram 4.23 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sesuai sebanyak 18 responden, yang menjawab tidak sesuai sebanyak 50 responden, yang menjawab sangat tidak sesuai sebanyak 30 responden, serta tidak ada responden yang menjawab sangat sesuai dari keseluruhan sampel.

Responden yang menjawab sesuai sebanyak 18 responden memberikan gambaran bahwa, Kriteria penerima raskin telah sesuai dengan harapan mereka. Hal ini disebabkan karena mereka cukup mengetahui adanya kriteria penerima raskin dari aparat setempat, walaupun tidak secara menyeluruh dipahami. Namun, berdasarkan pemahaman mereka, mereka menilai bahwa kriteria tersebut mampu membantu mereka memperoleh beras raskin.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 50 responden. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria penerima raskin tidak sesuai dengan harapan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena penerima raskin tidak mengetahui dan memahami kriteria tersebut secara spesifik, sehingga mereka menjawab demikian. Aparat setempat dalam menetapkan penerima raskin, kurang begitu melakukan sosialisasi terhadap kriteria penerima raskin. Sehingga penerima raskin tidak begitu mempermasalahkan kriteria tersebut. Sementara, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 30 responden. Hal ini disebabkan karena masyarakat miskin tidak mengetahui dan memahami secara menyeluruh kriteria tersebut karena tingkat pendidikan mereka yang tergolong rendah dan tidak adanya informasi yang disampaikan oleh aparat setempat.

Diagram 4.24
Penerima Raskin Membeli Beras Raskin Seharga
Rp 1.600 per Kg



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 23)

Berdasarkan diagram 4.24 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 1 responden, yang menjawab setuju sebanyak 8 responden, yang menjawab tidak setuju sebanyak 50 responden, serta yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 39 responden dari keseluruhan sampel.

Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 1 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin telah membeli beras raskin dengan harga Rp 1.600/Kg setiap bulannya. Hal ini disebabkan karena aparat setempat dalam menentukan harga beras raskin sangat menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan berupa Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 465/Kep.20-org/2009 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Raskin Untuk Kecamatan Se-Kota Serang Tahun 2009. Sementara, responden yang menjawab setuju sebanyak 8 responden. Hal ini menunjukkan bahwa aparat setempat pun melakukan hal yang sama, yaitu menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Walikota Serang di dalam menetapkan harga beras raskin.

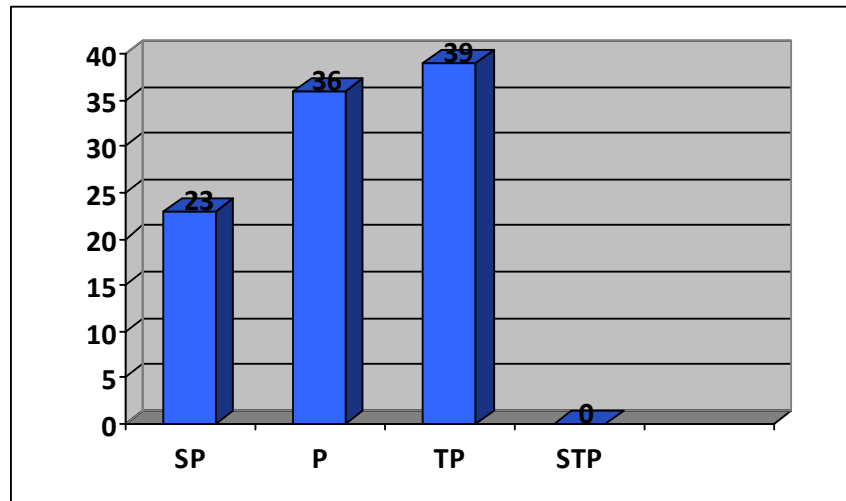
Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 50 responden. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata cukup banyak aparat setempat yang tidak menjalankan aturan yang telah dibuat oleh Walikota Serang. Misalnya saja terdapat beberapa harga beras raskin yang beragam, ada yang menetapkan harga Rp 2.000/kg, selain itu ada pula yang menetapkan harga Rp 2.100/kg. Sehingga penerima raskin menganggap

tidak membeli beras dengan harga yang seharusnya ditetapkan yaitu Rp 1.600/kg.

Sementara, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 39 responden. Hal ini menunjukkan bahwa penerima raskin sangat tidak merasa membeli beras raskin dengan harga Rp 1.600/kg. Mereka lebih sering membeli beras raskin dengan harga di atas Rp 1.600/kg dengan tambahan biaya lain yang dikenakan, seperti biaya kematian sebesar Rp 4.000/bulan. Hal ini disebabkan karena aparat setempat dalam menetapkan harga beras raskin tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh peraturan Walikota Serang. Hal ini terkadang menjadi beban tersendiri bagi mereka mengingat penghasilan mereka yang masih tergolong rendah (lihat tabel 4.4. hal 63), dan masih banyaknya kebutuhan lain yang harus dipenuhi misalnya kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan anggota keluarga.

Sebagian besar penerima raskin pun tidak mengetahui bila harga beras raskin yang sesuai dengan peraturan Walikota Serang adalah Rp 1.600/kg. Mereka hanya mengetahui harga beras raskin sesuai dengan yang disampaikan oleh aparat setempat yaitu Rp 2000/kg atau Rp 2100/kg. Walaupun harga beras raskin tidak sesuai dengan peraturan Walikota Serang, mereka masih merasa sanggup untuk membelinya (lihat diagram 4.10. hal 73). Sehingga perbedaan harga beras tersebut tidak menjadi persoalan yang besar bagi mereka untuk terus membeli beras raskin. Walaupun ada sebagian penerima raskin yang tergolong berpenghasilan rendah memperlmasalahakan harga beras tersebut.

Diagram 4.25
Kepuasan Penerima Raskin Terhadap Pelaksanaan Program



Sumber: Data Primer Diolah, 2010. (Pertanyaan No. 24)

Berdasarkan diagram 4.25 di atas, jawaban responden memberikan gambaran bahwa responden yang menjawab sangat puas sebanyak 23 responden, yang menjawab puas sebanyak 36 responden, yang menjawab tidak puas sebanyak 39 responden, serta tidak ada yang menjawab sangat tidak puas dari keseluruhan sampel.

Responden yang menjawab sangat puas sebanyak 23 responden memberikan gambaran bahwa, penerima raskin menganggap bahwa mereka merasa sangat puas dengan pelaksanaan program raskin yang telah berjalan. Hal ini disebabkan karena selama ini, mereka sangat puas dengan adanya program raskin yang sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Sementara, responden yang menjawab puas sebanyak 36 responden. Hal ini menunjukkan bahwa, penerima raskin merasa cukup puas

dengan pelaksanaan program raskin yang telah berjalan. Walau terkadang ditemukan beberapa hal yang kurang sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya saja, persoalan mengenai jumlah beras raskin yang tidak mencukupi kebutuhan keluarganya.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak puas sebanyak 39 responden. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata terdapat penerima raskin yang merasa tidak puas dengan pelaksanaan program raskin yang telah berjalan. Hal ini disebabkan karena berbagai keluhan mengenai kualitas, kuantitas beras raskin serta proses pengiriman beras yang menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat.

D. Pengujian Hipotesis

Penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009 ini, memiliki hipotesis sebagai berikut :

“Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009 sebesar 62,5 persen dari kriteria ideal yang ditetapkan”

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Adapun penghitungan pengujian hipotesis tersebut, yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh adalah $4 \times 98 \times 20 = 7840$ (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang dinyatakan pada responden yang termasuk kriteria skor berdasarkan pada skala Likert). (98 = jumlah anggota sampel yang dijadikan responden). (20 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada setiap responden). Sedangkan rata-rata $7840:98=80$.

Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang, nilai yang dihipotesiskan adalah sebesar 62,5 persen dari nilai ideal, hal ini berarti bahwa $0,65 \times 7840 = 5096$ dibagi $98 = 52$. Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan sebagai berikut : H_0 untuk memprediksi μ sebesar 62,5 persen dari skor ideal. Sedangkan, H_a lebih dari 62,5 persen dari skor ideal yang diharapkan. Atau hipotesis statistiknya dapat ditulis dengan rumus:

$$H_0 = \mu \leq 62,5\% \leq 0,65 \times 7840 : 98 = 50$$

$$H_a = \mu \geq 62,5\% \geq 0,65 \times 7840 : 98 = 50$$

Diketahui:

$$\bar{X} = \sum X : 98 = 5263 : 98 = 53,70$$

$$\mu_0 = 62,5\% = 0,625 \times 7840 : 98 = 50$$

$$s = 7,247$$

$$n = 98$$

ditanya : t ?

$$\text{Jawab : } t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$t = \frac{53,70 - 50}{\frac{7,247}{\sqrt{98}}}$$

$$t = \frac{3,7}{\frac{7,247}{9,8}}$$

$$t = \frac{3,7}{0,73}$$

$$t = 5,06$$

Harga t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t_{tabel} dengan derajat kebebasan $(d k) = n - 1 = (98 - 1 = 97)$ dan taraf kesalahan $\alpha = 10\%$, untuk uji satu pihak (*one tail test*). Berdasarkan dk 97 dan $\alpha = 10\%$, ternyata harga t tabel untuk uji satu pihak = 1,296. Karena harga t hitung lebih besar dari dari harga t tabel atau jatuh pada daerah penerimaan H_a ($5,06 \geq 1,296$) maka, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis kerja (H_a) diterima.

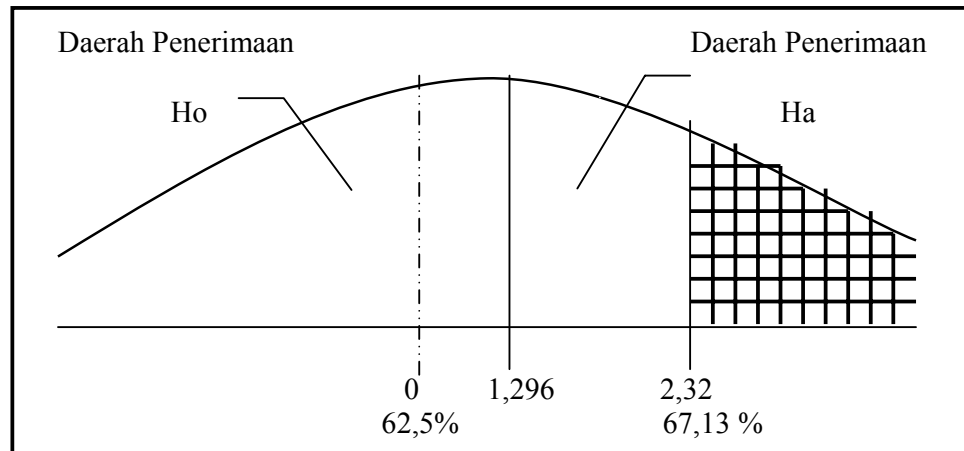
Berdasarkan perhitungan populasi, ditemukan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009 yaitu:

$$\text{Pelaksanaan Program Raskin} \frac{5263}{7840} \times 100\% = 67,13 \%$$

Jadi, telah diketahui bahwa Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009 adalah sebesar 67,13 persen.

Gambar 4.2

Kurva penerimaan dan penolakan Hipotesis



E. Interpretasi Hasil Penelitian

Interpretasi dari penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009 memiliki hal yang sangat utama, yaitu menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian sebagai hipotesis penelitian. Rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian adalah "Sejauhmanakah Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009?".

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus t test satu sampel dengan uji satu pihak (*one tail test*) bahwa harga t_{hitung} lebih besar

(\geq) dari harga t_{tabel} , maka, hal itu dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima karena mencapai angka 67,13 %.

Berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal instrumen adalah $4 \times 98 \times 20 = 7840$ (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang dinyatakan pada responden yang termasuk kriteria skor berdasarkan pada skala Likert). (98 = jumlah anggota sampel yang dijadikan responden). (20 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada setiap responden). Nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 5263. Nilai Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Serang Kota Serang adalah $5263 : 7840 = 0,671$ atau 67,13 persen. Interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009 mencapai angka 67,13 persen. Hal ini berarti program tersebut telah berjalan dengan baik. Penilaian tersebut didasarkan kepada indikator skor hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, jumlah skor hasil penelitian ini adalah 5263. Sehingga jumlah skor tersebut, termasuk ke dalam kategori baik. Indikator skor hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Indikator Skor Hasil Penelitian

No.	Nilai	Penjelasan
1	1960-3430	Sangat tidak baik
2	3430-4900	Tidak baik
3	4900-6370	Baik
4	6370-7840	Sangat baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data. 2010

F. Pembahasan

Pada pembahasan ini, peneliti akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai hasil dari uji hipotesis, dimana dalam pengujian tersebut didapat hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis kerja (H_a) diterima. Hasil ini memberikan arti bahwa Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009 mencapai angka 67,13 persen. Hal ini menandakan bahwa ternyata pelaksanaan program tersebut di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009 telah berjalan dengan baik.

Hasil perolehan nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh oleh peneliti. skor ideal instrumen adalah $4 \times 98 \times 20 = 7840$ (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang dinyatakan pada responden yang termasuk kriteria skor berdasarkan pada skala Likert). (98 = jumlah anggota sampel yang dijadikan responden). (20 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada setiap responden). Hasil kuesioner pada tahap pengumpulan data adalah sebesar $5263 : 7840 = 0,671$ atau 67,13 persen.

Hasil penelitian Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009, dapat dilihat kembali relevansinya dengan teori evaluasi kebijakan publik menurut Dunn berdasarkan pendekatan kriteria evaluasi kebijakan publik. Menurut Dunn, terdapat beberapa kriteria yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik yang meliputi efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu

alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas program sangat berkaitan erat dengan apakah sejauh ini pelaksanaan program raskin telah mencapai tujuan yang diharapkan. Efektifitas program raskin dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara konsep dengan fakta di lapangan, sehingga dimungkinkan tujuan program dapat berjalan dengan baik.

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi. Efisiensi program raskin dapat terlihat bilamana pelaksanaan program telah berjalan dengan biaya yang efisien, sehingga keberhasilan program raskin tidak hanya dilihat dari efektifitas program melainkan juga dilihat dari efisiensi program. Kecukupan (*adequency*) berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas dalam memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan program raskin berkaitan dengan sejauh mana kepuasan penerima raskin sebagai sasaran program dalam mencukupi kebutuhannya.

Perataan berkenaan dengan kebijakan yang akibat atau usahanya secara adil didistribusikan secara merata. Perataan program raskin merupakan manfaat yang diterima oleh penerima raskin disalurkan secara merata. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas program raskin merupakan

bentuk respon penerima raskin yang timbul akibat kepuasan mereka terhadap pelaksanaan program. Ketepatan (*appropriateness*) berkenaan pada nilai atau harga dari tujuan program, dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan program raskin mengacu pada apakah tujuan atau nilai program dapat mengakomodir fakta program di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009 telah berjalan dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada identifikasi masalah yang telah peneliti buat. Peneliti membuat identifikasi masalah berdasarkan observasi awal di lapangan yaitu sebagai berikut.

Pertama, masih belum diterapkannya kriteria penerima raskin berdasarkan kriteria keluarga miskin menurut program Jaminan kesehatan masyarakat (Jaskesmas), Tim Koordinasi Pusat Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin, serta menurut Badan Pusat Statistik (BPS) secara merata di sejumlah kelurahan di Kecamatan Serang. Aparat setempat lebih menggunakan data lain seperti, data tim kader posyandu atau lebih menggunakan subyektivitas dalam menentukan siapa saja yang layak untuk menjadi penerima raskin.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa ternyata kriteria penerima raskin memang tidak diterapkan secara baik kepada masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena aparat setempat hanya menggunakan subyektifitasnya saja guna menetapkan keluarga miskin yang

layak menjadi penerima raskin. Hal tersebut cenderung subyektif karena hanya didasarkan oleh pemikiran aparat setempat saja.

Hasil penelitian dari permasalahan tersebut juga diperkuat dengan adanya dominasi jawaban penerima raskin yang menjawab tidak setuju sebanyak 60 orang, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 20 orang. Jawaban tersebut memberikan gambaran bahwa penerima raskin menganggap bahwa program raskin tidak ditujukan kepada masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria program raskin. Sebagian besar responden menjawab demikian, karena penerima raskin tidak mengetahui akan adanya kriteria program yang digunakan dalam menetapkan penerima raskin. Terlebih yang membeli beras raskin tidak hanya yang berasal dari keluarga miskin namun, keluarga yang terbilang cukup mampu turut membelinya. Sementara, hanya terdapat 18 orang yang memberi penilaian bahwa program raskin ditujukan kepada masyarakat miskin yang telah sesuai dengan kriteria program.

Kedua, adanya kecemburuan sosial yang terjadi pada kalangan masyarakat lain dalam proses penerimaan beras raskin. Hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat lain dalam konteks cukup mampu masih memiliki keinginan kuat untuk juga memperoleh beras raskin. Alasan kuat mengapa hal tersebut terjadi, karena harga beras raskin yang cenderung lebih murah bila dibandingkan dengan harga beras lain pada umumnya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, dalam proses pembagian jatah beras raskin yang ditujukan hanya kepada keluarga

miskin secara merata menimbulkan jawaban responden yang beragam. Jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 22 orang, dan yang menjawab setuju sebanyak 56 orang, hal tersebut menunjukkan bahwa proses penerimaan atau pembagian beras raskin memang dilakukan hanya kepada keluarga miskin secara merata. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat benar-benar memahami bahwa program raskin hanya ditujukan kepada masyarakat miskin, sehingga masyarakat lain yang tidak termasuk dalam kriteria program tidak memiliki keinginan untuk membeli beras raskin.

Terdapat penerima raskin yang menjawab tidak setuju sebanyak 19 orang dan 1 orang yang menjawab sangat tidak setuju akan persoalan tersebut. Hal ini terjadi karena terdapat sebagian masyarakat yang masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah, sehingga mereka cenderung untuk menjadi penerima raskin. Pembagian jatah beras raskin pun cenderung lebih dilakukan kepada masyarakat yang memiliki keinginan untuk membeli beras raskin tanpa memperhatikan kelayakannya.

Ketiga, tingkat daya beli rumah tangga miskin relatif rendah terhadap beras raskin, karena penghasilan keluarga yang tidak sebanding dengan biaya yang harus dibayar untuk membeli beras raskin. Hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh peneliti melalui kuesioner. Pendapatan masyarakat miskin sebagai penerima beras raskin di Kecamatan Serang relatif bervariasi walaupun terdapat jawaban yang mendominasi. Terdapat 47 responden dengan tingkat penghasilan dibawah Rp. 20.000/hari, 34

responden dengan tingkat penghasilan Rp. 21.000 – Rp. 50.000/hari, 12 responden dengan tingkat penghasilan Rp. 51.000 – Rp.100.000/hari, serta 5 responden dengan tingkat penghasilan di atas Rp. 101.000/hari. Data diatas menunjukkan bahwa secara garis besar, penghasilan penerima raskin \leq Rp 20.000/hari.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat penerima raskin yang menjawab sangat setuju sebanyak 24 responden, dan yang setuju sebanyak 45 responden. Hal ini disebabkan karena sebagian penerima raskin menganggap bahwa mereka cukup mampu untuk membeli beras raskin setiap bulannya, karena mereka lebih memilih membeli beras raskin dengan harga cukup terjangkau dengan penghasilan mereka bila dibandingkan dengan harga beras lainnya. Sementara, penerima raskin yang menjawab tidak setuju sebanyak 29 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli beras raskin setiap bulannya karena daya beli mereka cenderung rendah. Belum lagi bila ditambahkan dengan kebutuhan lainnya yang perlu mendapat perhatian serius, seperti kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan.

Keempat, kualitas beras raskin tidak sesuai dengan harapan penerima raskin. Kualitas beras raskin cenderung diterima dalam kondisi bau, berwarna dan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penerima raskin mengamini hal tersebut. Hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh peneliti melalui kuesioner penelitian. Terdapat penerima raskin yang

menjawab setuju sebanyak 37 orang. Hal ini disebabkan karena mereka merasa puas dengan kualitas beras raskin yang diterima, dan cenderung beras raskin dalam kondisi cukup baik untuk dikonsumsi. Serta mereka lebih menerima apapun kondisi beras raskin yang diterima secara terbuka. Namun, sebagian besar penerima raskin menjawab tidak setuju sebanyak 51 orang dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 10 orang. Hal ini disebabkan karena mereka merasa tidak puas dengan kualitas beras raskin yang cenderung bau, buruk dan kurang layak untuk dikonsumsi.

Kelima, tidak terserapnya seluruh rumah tangga miskin yang menjadi rumah tangga sasaran, yang didasari atas terbitnya Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 465/Kep.20-Org/2009 mengenai Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Untuk kecamatan se-Kota Serang. Salah satu efek yang timbul dari hal tersebut adalah adanya pengurangan jatah beras raskin yang dilakukan oleh aparat setempat dalam membagikan beras raskin kepada penerima raskin. Sehingga, sebagian penerima raskin setiap bulannya hanya menerima jatah beras sebanyak 2-7 liter setiap bulannya. Walaupun ada sebagian kecil yang memperoleh 1 karung beras setiap bulannya. Tindakan aparat setempat dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik di kalangan penerima raskin.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 orang yang menjawab sangat setuju dan 6 orang yang menjawab setuju bahwa mereka merasa cukup dengan jumlah beras raskin yang telah

mereka terima. Namun, sebagian besar responden menjawab tidak setuju sebanyak 48 orang dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 43 orang. Hal ini disebabkan karena mereka menilai jumlah beras raskin yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulan. Terlebih, bagi penerima raskin yang memiliki jumlah anggota keluarga yang cukup banyak.

Keenam, terjadinya pengurangan jatah beras subsidi kepada masing-masing kepala keluarga sasaran, yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 465/Kep.20-Org/2009 mengenai Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) untuk Kecamatan Se-Kota Serang. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, penerima raskin menerima jatah beras raskin sebanyak 15 Kg/bulan. Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan sebagian besar penerima raskin hanya menerima beras raskin sebanyak 2-7 liter setiap bulannya dan hanya sebagian kecil yang menerima 1 karung beras raskin. Terjadinya pengurangan jatah beras tersebut, lebih disebabkan karena aparat setempat lebih menghindari timbulnya konflik di antara penerima raskin.

Ketujuh, tidak dilibatkannya unsur-unsur lain dalam pelaksanaan program raskin, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, (LSM) dan Mahasiswa, sebagaimana yang telah diputuskan melalui Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 465/Kep.20-Org/200 Serang di beberapa kelurahan, Kecamatan Serang. Berdasarkan informasi yang diperoleh di

lapangan, bahwa LSM dan mahasiswa tidak memiliki peranan dalam mekanisme pelaksanaan program raskin di Kecamatan Serang.

Kedelapan, adanya pungutan lain diluar dari biaya yang seharusnya dikenakan kepada rumah tangga sasaran dalam membeli beras subsidi tersebut. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang tidak diatur melalui Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 465/Kep.20-Org/2009 mengenai Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) untuk Kecamatan Se-Kota Serang.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan sebagian kecil responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 1 orang dan yang menjawab setuju sebanyak 8 orang. Hal ini disebabkan karena penerima raskin membeli beras raskin sesuai dengan harga yang telah ditetapkan yaitu Rp 1.600/kg tanpa adanya biaya lain. Namun, sebagian besar responden menjawab tidak setuju sebanyak 50 orang, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 39 orang. Hal ini disebabkan karena mereka menilai tidak membeli beras raskin sesuai dengan harga yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.600/kg, melainkan harga yang cukup berbeda antara Rp 2.000/kg sampai Rp 2.100/kg. Terdapat biaya lain yang dibebankan pula kepada penerima raskin untuk biaya kematian menjadi sebesar Rp 4.000/bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai hambatan-hambatan yang terjadi pada Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009, maka peneliti mempertegas kembali mengenai pengujian hipotesis, dimana dalam

pengujian hipotesis tersebut didapat bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis kerja (H_a) diterima. Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan, bahwa Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009 telah mencapai 67,13 persen dari angka yang telah ditetapkan. Artinya, Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009 telah berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) merupakan program nasional yang ditujukan kepada masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria miskin berdasarkan Tim Koordinasi Pusat Pemberian Subsidi Langsung Tunai, atau sesuai dengan Program Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Tujuan dari adanya program raskin adalah untuk meningkatkan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kecamatan Serang adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kota Serang yang mendapatkan perolehan jatah beras raskin setiap tahunnya. Perolehan alokasi tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 465/Kep.20-org/2009 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Raskin Untuk Kecamatan Se-Kota Serang Tahun 2009. Pada tahun 2009, Kecamatan Serang memperoleh jatah beras raskin sebanyak 4.904 rumah tangga miskin yang tersebar di 12 kelurahan.

Secara sederhana, evaluasi dapat diartikan sebagai penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*) serta kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam

arti satuan nilainya. Sementara, evaluasi pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja kebijakan baik yang sedang atau telah berjalan. Evaluasi pelaksanaan kebijakan diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu, serta bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik.

Dalam memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan, maka dibutuhkan teori sebagai pedoman peneliti dalam melakukan penelitian. Maka, teori yang dijadikan pedoman dalam mengukur tingkat kesesuaian antara konsep dengan fakta di lapangan adalah teori Dunn mengenai kriteria evaluasi kebijakan publik. Terdapat 6 indikator yang masuk ke dalam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, serta ketepatan. Terdapat hubungan yang relevan antara teori Dunn dengan pendekatan kriteria evaluasi kebijakan yang dipakai dengan mengukur pelaksanaan kebijakan publik. Hubungannya terletak pada keenam kriteria tersebut mampu menjawab permasalahan-permasalahan pelaksanaan program raskin dan mampu digunakan untuk menilai sejauhmana pelaksanaan program raskin di Kecamatan Serang.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menjadikan kuesioner sebagai instrumen penelitiannya. Populasi pada penelitian ini berjumlah 4.904 rumah tangga miskin sesuai dengan penerima raskin pada tahun 2009. Namun, karena

peneliti memiliki keterbatasan dari segi sumber daya yang dimiliki. Maka peneliti menggunakan sampel dengan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10 persen, sehingga di dapat 98 rumah tangga miskin. Sementara, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling*.

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka peneliti melakukan penyimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu :

“Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009 telah berjalan dengan baik karena hasil uji hipotesis mencapai angka 67,13 persen dari angka yang telah peneliti hipotesiskan sebelumnya yaitu sebesar 62,5 persen”.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas dengan judul ” Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2009” berjalan dengan baik yaitu mencapai angka 67,13 persen dari hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya, yaitu 62,5 persen.

Namun, berdasarkan atas kendala atau hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaan program raskin di Kecamatan Serang, maka peneliti

mencoba memberikan saran terhadap hasil penelitian agar dapat membantu para pelaksana kebijakan dalam menjalankan program raskin sesuai dengan tujuan program yang telah digariskan sebagai berikut.

Perlu adanya pendataan ulang terkait dengan penetapan program raskin yang dilakukan oleh aparat setempat dalam hal ini RT/RW yang mengacu pada kriteria penerima raskin secara nasional, meliputi kriteria Tim Koordinasi Pusat Pemberian Subsidi Langsung Tunai, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) serta kriteria keluarga miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini perlu dilakukan karena kriteria penerima raskin tidak diterapkan secara baik kepada masyarakat miskin.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dari jumlah responden sebanyak 98 orang, terdapat 60 responden yang menjawab tidak setuju dan 20 orang yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini disebabkan karena mereka menilai kriteria program raskin tidak diterapkan secara baik kepada masyarakat miskin. Mereka tidak mengetahui akan adanya kriteria yang dipakai untuk menetapkan penerima raskin. Sementara, hanya terdapat 18 orang yang memberi penilaian bahwa kriteria program raskin telah dilakukan secara tepat kepada penerima raskin.

Perlu adanya peninjauan kembali oleh Gubernur Banten dan Walikota Serang dalam menetapkan pagu alokasi raskin pada tahun 2009, sehingga rumah tangga miskin di lapangan dapat terserap seluruhnya untuk menerima program tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena efek yang timbul dari hal itu adalah adanya pengurangan dari segi jumlah beras raskin yang diterima.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat responden sebanyak 48 orang (TS) dan 43 orang (STS) yang menjawab jumlah beras raskin tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok keluarga miskin setiap bulannya. Sementara hanya 1 orang (SS) dan 6 orang (S) yang menjawab jumlah beras raskin cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Masih adanya rumah tangga miskin yang tidak sanggup membeli beras raskin setiap bulannya karena tidak sesuai dengan penghasilannya, maka hendaknya pihak RT/RW memberikan keringanan pada mereka untuk mengambil beras dahulu lalu dibayar kemudian secara berkala. Hal ini dimaksudkan karena sebagian besar dari mereka sangat mengandalkan beras tersebut. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat penerima raskin yang menjawab sangat setuju sebanyak 47 orang dan yang menjawab setuju sebanyak 32 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat mengandalkan beras raskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sementara, hanya terdapat 19 orang yang tidak begitu mengandalkan beras raskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Hendaknya Bulog sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyaluran beras raskin selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas beras menjadi lebih baik lagi agar penerima raskin merasa puas dengan beras tersebut. Hal ini disebabkan karena penerima raskin merasa tidak puas dengan kualitas beras raskin. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan terdapat 51 orang (TS) dan 10 orang (STS) yang tidak puas dengan kualitas

beras raskin. Sementara hanya ada 37 orang (S) yang puas dengan kualitas beras raskin selama ini.

Hendaknya aparat setempat dalam hal ini RT/RW dalam menetapkan harga beras raskin, harus sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Serang Nomor 465/Kep.20-Org/2009 mengenai Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk kecamatan se-Kota Serang. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat 50 orang (TS) dan 39 orang (STS) yang menjawab tidak merasa membeli beras raskin dengan harga Rp 1.600/kg, melainkan seharga Rp 2.000/kg dan Rp 2.100/kg. Sementara, hanya terdapat 1 orang (SS) dan 8 orang (S) yang menjawab telah membeli beras raskin dengan harga Rp 1.600/kg.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Dimock dan Dimock. 1992. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Faisal, Sanapiah. 2001. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hatta, Mohammad. 2002. *Satu Abad Bung Hatta*. Jakarta: UI Press
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM
- Kuncoro, Mudajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Purwanto. 2007. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soemarmowoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan
- Soenarko. 2003. *Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta
- Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

- Syafiie, Kencana, Inu, Djamaludin Tandjung & Supardan Modeong. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Thoha, Miftah. 2005. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tim Pengkajian Kebijakan Perberasan Nasional. 2001. *Bunga Rampai Ekonomi Beras*. Jakarta: LPEM-UI
- Tirtosudiro, Achmad. 1997. *Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jakarta: PT Intermedia
- Wicaksono, Widya, Kristian. 2006. *Modul Analisis Kebijakan Publik*.

Dokumen :

- Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 511.1/Kep.36-Huk/2009 Tentang *Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2009*
- Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 465/Kep.20-Org/2009 Tentang *Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Kecamatan Se-Kota Serang Tahun 2009*
- Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 465/Kep.21-Org/2009 Tentang *Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kota Serang Tahun 2009*
- Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 504/Kep.7-Huk/2010 Tentang *Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Kecamatan Se-Kota Serang Tahun 2010*
- Surat Keputusan Camat Serang Nomor 138/04.b/Kec.Srg/2009 Tentang *Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kecamatan Serang Tahun 2009*

Kuesioner Penelitian

Jenis Kelamin :
Usia :
Pendidikan :
Pekerjaan :

A. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah angket ini dengan teliti, supaya Bapak/Ibu mengerti maksud pertanyaannya.
2. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dari beberapa pilihan dengan cara disilang (√).
3. Bila ada pertanyaan yang kurang dimengerti bisa ditanyakan secara langsung pada peneliti.
4. Kumpulkan jawaban secara langsung pada peneliti.

No.	Kalimat Pertanyaan	SS	S	TS	STS
A. Kepuasan penerima raskin terhadap kualitas dan kuantitas beras raskin					
1.	Penerima raskin merasa puas dengan kualitas beras raskin yang telah diterima				
2.	Penerima raskin merasa puas dengan perolehan beras raskin yang telah diterima				
B. Manfaat program raskin terhadap beban masyarakat miskin					
3.	Program raskin dinilai telah membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin				
4.	Program raskin telah membantu dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin				
C. Kemampuan daya beli dan kesesuaian kualitas beras raskin					
5.	Penerima raskin dinilai sangat mampu membeli beras raskin dengan harga Rp 1600/kg dengan batas maksimal 15 kg/KK				
6.	Harga beras raskin sebanding dengan kualitas beras yang telah diterima oleh penerima raskin.				
D. Proses Pendistribusian beras raskin					
7.	Proses penyaluran beras raskin dinilai sudah tepat waktu				
8.	Proses penyaluran beras raskin disalurkan secara baik tanpa adanya pungutan lain yang dibebankan kepada masyarakat miskin				
E. Pemenuhan kebutuhan pokok					

9.	Penerima raskin sangat mengandalkan beras raskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.				
10.	Program raskin dinilai telah dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin				
F. Kecukupan kuantitas beras raskin					
11.	Penerima raskin merasa cukup dengan jumlah beras raskin yang telah diperoleh				
12.	Jumlah beras raskin yang diterima dinilai telah sebanding dengan jumlah kebutuhan konsumsi beras rumah tangga miskin setiap bulannya				
G. Pemerataan Pembagian jatah beras raskin					
13.	Pembagian jatah beras raskin telah dilakukan secara merata hanya kepada masyarakat miskin				
14.	Pembagian jatah beras raskin yang dilakukan telah sesuai dengan harapan masyarakat				
H. Penyampaian informasi program raskin					
15.	Penyampaian informasi program raskin telah dilakukan secara merata kepada seluruh penerima raskin				
16.	Penyampaian informasi program raskin sangat mudah dipahami oleh penerima raskin.				
I. Pemahaman rumah tangga miskin terhadap pengurangan jatah beras raskin					
17.	Penerima raskin telah mengetahui adanya pengurangan penerima jatah beras raskin				
18.	Penerima raskin telah memahami penyebab adanya pengurangan penerima jatah raskin				
J. Pengetahuan rumah tangga miskin akan kriteria penerima raskin					
19.	Masyarakat miskin telah mengetahui adanya kriteria penerima raskin dari pemerintah setempat				
20.	Kriteria penerima raskin sangat mudah dipahami oleh masyarakat miskin				
K. Ketepatan penerima raskin terhadap kriteria program raskin					
21.	Program raskin ditujukan kepada masyarakat miskin yang telah sesuai dalam kriteria program raskin				
22.	Kriteria penerima raskin telah sesuai dengan harapan masyarakat miskin				
L. Ketepatan program raskin terhadap masyarakat miskin					
23.	Penerima raskin telah membeli beras raskin seharga Rp 1.600/kg dengan batas maksimal 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan				

24.	Penerima raskin merasa puas dengan pelaksanaan program raskin yang telah berjalan				
-----	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Ket :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std.	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std.Error	Statistic	Statistic	Statistic	Std.Error	Statistic	Std.Error
Pert1	98	2	1	3	223	2,28	.065	.639	.408	-313	.244	-658	.483
Pert2	98	3	1	4	221	2,26	.082	.816	.666	.076	.244	-591	.483
Pert3	98	3	1	4	302	3,08	.073	.728	.529	-618	.244	.558	.483
Pert4	98	2	2	4	342	3,49	.064	.630	.397	-845	.244	-289	.483
Pert5	98	2	2	4	289	2,95	.074	.737	.544	81	.244	-1.136	.483
Pert6	98	3	1	4	260	2,65	.083	.826	.683	-168	.244	-452	.483
Pert7	98	2	1	3	229	2,34	.065	.641	.411	-440	.244	-665	.483
Pert8	98	3	1	4	268	2,73	.104	1.031	1.063	-424	.244	-929	.483
Pert9	98	2	2	4	322	3,29	.078	.773	.598	-546	.244	-1.121	.483
Pert10	98	3	1	4	224	2,29	.074	.732	.536	-184	.244	-587	.483
Pert11	98	3	1	4	161	1,64	.065	.646	.418	.736	.244	.639	.483
Pert12	98	3	1	4	164	1,67	.063	.622	.387	.620	.244	.813	.483
Pert13	98	3	1	4	277	2,83	.079	.787	.619	.189	.244	-1.088	.483
Pert14	98	3	0	3	58	.59	.089	.883	.780	1.089	.244	-318	.483
Pert15	98	2	2	4	327	3,34	.069	.688	.473	-553	.244	-765	.483
Pert16	98	4	0	4	103	1,05	.149	1.474	2.173	.758	.244	-1.300	.483
Pert17	98	3	1	4	227	2,32	.105	1.041	1.084	.224	.244	-1.114	.483
Pert18	98	3	0	3	59	.60	.090	.894	.799	1.057	.244	-430	.483
Pert19	98	2	1	3	184	1,88	.070	.693	.480	.167	.244	-885	.483
Pert20	98	3	0	3	58	.59	.089	.883	.780	1.089	.244	-318	.483
Pert21	98	3	1	4	266	2,71	.083	.825	.680	-209	.244	-435	.483
Pert22	98	3	1	4	254	2,59	.061	.606	.368	-644	.244	.094	.483
Pert23	98	3	1	4	167	1,7	.067	.661	.437	.626	.244	.364	.483
Pert24	98	2	2	4	278	2,84	.079	.782	.612	.297	.244	-1.303	.483
Total	98	35	36	71	5263	53,7	.732	7.247	52.520	.328	.244	-193	.483
Valid N (listwise)													

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

Nama : Erik Agustiara
NIM : 062399
Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 19 Juli 1989
Agama : Islam
Suku : Sunda
Alamat : Griya Permata Asri Blok B12 No.12,
Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok
Jaya.
Hobi : Bermain, membaca dan diskusi
Moto Hidup : Berbuatlah dengan penuh ketulusan

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Herman Fauzi
Nama Ibu : Mahety

3. Riwayat Pendidikan

SD : SDN KAMPUNG UTAN (1997-2002)
SMP : SLTP TIRTA BUARAN (2002-2004)
SMA : SMA INFORMATIKA (2004-2006)
Perguruan Tinggi (S1) : Adm. Negara-UNTIRTA (2006-2010)

4. Riwayat Organisasi

- a. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTIRTA (2007-2008)
- b. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP UNTIRTA (2009-2010)
- c. Anggota aktif Untirta Movement Community (UMC)